

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG –UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH 2018**

**(Studi Pada Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas–Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari’ah**

**Oleh :**

**Alfhiryana Aulya Dwi Putri**

**NPM: 1521020096**

**Program Studi : Siyasah ( Hukum Tata Negara )**



**FAKULTAS SYARI’AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H/2019 M**

## ABSTRAK

Badan pengawas pemilihan umum sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan mempunyai tugas dan wewenang yang penting dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 di kota Bandar Lampung untuk mengupayakan perwujudan pemilihan yang demokratis dan berdasarkan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mengupayakan pencegahan timbulnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pemilihan kepala daerah tahun 2018 di kota Bandar Lampung.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana tugas dan wewenang bawaslu dalam pengawasan pemilihan kepala daerah Tahun 2018 Di Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 terhadap tugas dan wewenang bawaslu dalam pemilihan kepala daerah provinsi Lampung tahun 2018 di kota bandar. Tujuan penelitian ini untuk Untuk mengetahui tugas dan wewenang bawaslu kota Bandar Lampung dalam pengawasan pemilihan kepala daerah provinsi Lampung tahun 2018 di tinjauan dalam *fiqh siyasah* dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 .

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Dalam pengumpulan data yang diperlukan, penelitian ini merupakan pengumpulan bahan dari lapangan seperti wawancara sebagai metode pokok, kemudian metode observasi, dan dokumentasi sebagai metode pendukung.

Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa badan pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang yang sangat penting untuk keberhasilan pemilu pada tahun 2018 di kota Bandar Lampung, pelaksanaan tugas bawaslu haruslah sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan harus lah pengamalan dari *amar ma'ruf nahi munkar*, menyuruh kepada makruf dan mencegah kemunkaran.

**Kata kunci:** *Fiqh Siyasah, Bawaslu, Pemilihan umum kepala daerah*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung. Tlp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Nama : Alfhiryana Aulya Dwi Putri**  
**Npm : 1521020096**  
**Jurusan : Siyasah**  
**Fakultas : Syari'ah dan Hukum**  
**Judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2018 (Studi Pada Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 197009011997031002**

**Eko Widayat, Sos., M.H**  
**NIP. 197512302003121002**

Ketua Jurusan Siyasah

**Drs. Susiadi As., M.Sos.I**  
**NIP. 195808171993301002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung. Tlp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2018 (Studi Pada Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)**. Disusun oleh : **ALFHIRYANA AULYA DWI PUTRI, NPM : 1521020096**, Program Studi : **Siyasah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: **Senin, 27 Mei 2019**.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A.** (.....)

**Sekretaris : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji II : Dr. Alamsyah, S.Ag., M. Ag.** (.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

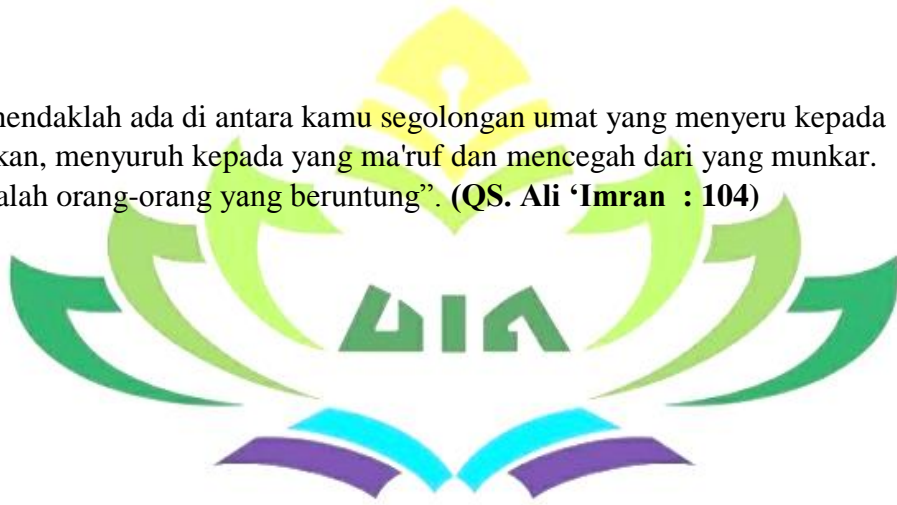
**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

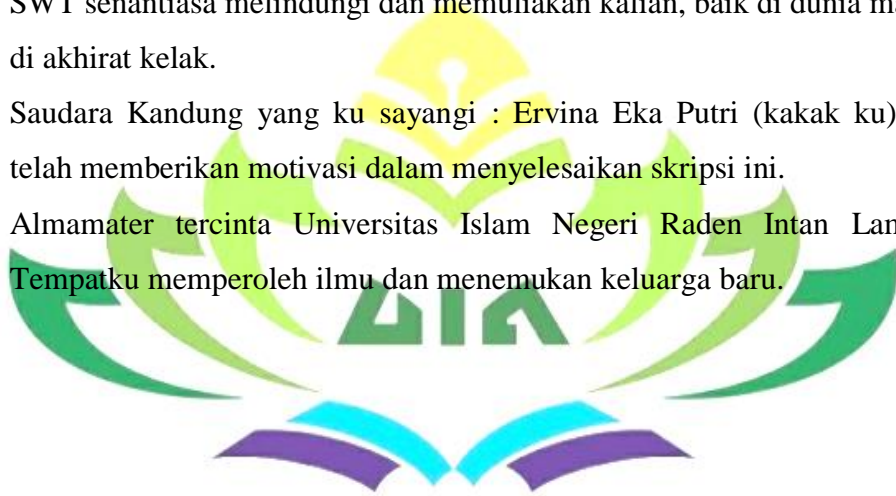
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali ‘Imran : 104)



## PERSEMBAHAN

Dengan Keridhoan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Rasdin dan Ibunda Zuraidah, dua insan tercintaku, yang selalu menyayangi, mendidik, dan membimbingku tanpa ada kata lelah dan putus asa. Penyemangat utamaku dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan kalian, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
2. Saudara Kandung yang ku sayangi : Ervina Eka Putri (kakak ku) yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis lahir di Bandar Lampung, Pada Tanggal 20 Mei 1997 anak kedua dari dua bersaudara, anak dari Pasangan Bapak Rasdin dan Ibu Zuraidah.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Radin Intan Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2002. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Kupang Raya Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2008. Penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Swasta Taman Siswa Teluk Betung Bandar Lampung pada tahun 2011, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 8 Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2014. Penulis diterima sebagai mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur UM Mandiri.

Pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 30 hari di desa Sri Katon, kecamatan Tanjung Bintang, kabupaten Lampung Selatan.

Bandar Lampung, 13 Mei 2019

Penulis

Alfhiryana Aulya Dwi Putri

1521020096

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan Skripsi guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) yang penulis beri judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 (Studi Pada Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)”** shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang insya Allah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr.Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. Drs. Susiadi, M.Sos.I selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
3. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan tak bosan-bosannya membimbing dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.



4. Bapak Eko Hidayat, Sos., M.H selaku pembimbing II yang ikhlas meluangkan waktunya, memberikan pengarahan dan memberikan masukan-masukan dalam penulisan karya ilmiah ini.
5. Bapak Frenki selaku Sekretaris jurusan Siyasah.
6. Bapak Irfan yang ikut andil dalam kepengurusan dalam jurusan Siyasah.
7. Bapak dan Ibu dosen serta Civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
8. Datukku H. Zainul Abidin yang telah memberikan kebahagiaan kepada cucu-cucunya. Dengan kerja kerasnya kami bisa seperti sekarang.
9. Keluarga besarku tante Ana, om Indra, tante Atun, om Kiki, tante Rina, om Agus, tante Sulis, om Ijul. Sepupu-sepupu cantikku, Aca, Indah, Piko, Jihan, Nisa, dan Sepupu-sepupu Tampan, Deni, Rifki, Pais, Reza, Ajil, Kevin, Jodi, Zaki terima kasih atas bantuan, nasehat, dukungan dan doanya selama ini.
10. Eka Sanjaya yang telah yang telah banyak membantu, menemani di sela kesibukannya. Terimakasih untuk waktu dan perhatiannya.
11. Ibu Eka yang sudah menjadi Ibu Keduaku yang telah banyak memberikan banyak kasih sayang, motivasi, dan saran untuk menjadikan aku orang yang lebih baik.
12. Sahabat-sahabat Waria (Wanita-Wanita Ceria) Muvita, Desi, Diah, Inas, Beby, dan Kartika yang telah memberikan motivasi, memberikan semangat, membantu, dan menemani dalam mengerjakan skripsi ini.

13. Teman-teman KKN Terdrama Astri, Desy, Ayu, Epret (Epi), Mifta, Shinta, Nisa, Rima, Ari, Yogi, dan Ali terima kasih sudah berjuang bersama selama KKN dan berteman selayaknya keluarga baru.
14. Teman-teman seperjuangan Siyasah D 2015 yang telah banyak memberikan warna kehidupan dalam perkuliahan dan memberikan semangat.
15. Teman Mahasiswa Jurusan Siyasah 2015 yang telah ikut membantu proses penyelesaian.
16. Bang Buchori dan seluruh Jajaran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung.
17. Karyawan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan FS UIN Raden Intan Lampung dan seluruh pihak akademis yang telah melayani dalam hal administrasi dan lainnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Hasil karya yang sederhana ini, semoga bermanfaat khususnya dalam bidang khasanah Siyasah.

Bandar Lampung, 13 Januari 2019  
Penulis

Alfhiryana Aulya Dwi Putri  
1521020096

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
 <b>BAB II    LANDASAN TEORI .....</b>	 <b>13</b>
A. <i>FiqhSiyasah</i> Tentang Pengawasan Lembaga Negara .....	13
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> dan Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i> .....	13
2. Ruang Lingkup Kajian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	18
3. Prinsip-Prinsip dan Kaidah-Kaidah Pemerintahan dalam <i>Fiqh Siyasah</i> .....	19
4. LembagaPengawasandalam <i>FiqhSiyasah</i> .....	36
B. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.....	40

1. Pengertian Pengawas Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.....	40
2. Dasar Hukum Pengawas Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.....	43
3. Tugas, Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.....	47
C. Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 .....	49
1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah .....	49
2. Asas-Asas Pemilihan Kepala Daerah.....	51
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Struktur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung .....	53
B. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung .....	69
<b>BAB IV ANALISIS.....</b>	<b>76</b>
A. Tugas Dan Wewenang Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Bandar Lampung .....	76
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Tugas Dan Wewenang Bawaslu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Di Kota Bandar Lampung .....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	85

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. SekretariatPanwaslu Kota Bandar Lampung .....	57
2. PanwasluKecamatan se-Kota Bandar Lampung .....	59
3. PanwasluKelurahan se-Kota Bandar Lampung .....	64
4. DaftarPergantianPanwasluKelurahan .....	67





## DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1. Bagan Struktur Organisasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota  
Bandar Lampung.....56



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman Wawancara dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung
- Lampiran II : Surat Izin Riset dari Fakultas dan Kesbangpol
- Lampiran III : Surat Penerimaan Izin Riset



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah. Untuk memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya, dengan jelas judul skripsi ini adalah : **“TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2018 (Studi Pada Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)”**. Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan maka perlu adanya pengesahan judul. Judul ini memiliki beberapa istilah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau atau yang di dapat setelah meyelidiki, mempelajari, dan sebagai tinjauannya tepat, benar dengan dugaannya semula.<sup>1</sup>
2. *Fiqh siyasah* , berasal dari dua kata yaitu *Fiqh* dan *Siyasah*, *Fiqh* berarti “paham yang mendalam”. *Fiqh* berasal dari kata “*fa qa ha*” yang diantaranya berarti bentuk tertentu dari kedalaman paham dan kedalaman ilmu yang menyebabkan dapat diambil manfaat daripadanya. Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan bahwa *fiqh* itu adalah ilmu

---

<sup>1</sup> Petter Salim, Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern Englis Press), h. 1621.

tentang hukum Allah.<sup>2</sup> Dan kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan lisan *Al-Arab* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan. *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik.<sup>3</sup>

3. Tugas yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian pekerjaan, sesuatu yang harus dikerjakan.<sup>4</sup>
4. Wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berasal dari kata *wenang* berarti hak dan kekuatan untuk melakukan sesuatu.<sup>5</sup>
5. Badan pengawas adalah gabungan dari kata *badan* dan *pengawas*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *badan* yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu<sup>6</sup>. Dan kata *Pengawas* adalah suatu kegiatan yang melihat dan memantau suatu pekerjaan.<sup>7</sup>
6. Pemilihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan memilih<sup>8</sup>
7. Kepala Daerah yaitu mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi dan dekonsentrasi, yaitu Gubernur.<sup>9</sup>

Berdasarkan penegasan kalimat diatas maka dapat disimpulkan bahwa dimaksud dengan “Tinjauan Fiqh Siyasah Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 7

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktri Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 356

<sup>4</sup> S. Wokowasito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Menurut Pedoman Lembaga Bahasa Nasional (Edisi Revisi)*, (Malang : C.V. Pengarang, 1999), h. 444

<sup>5</sup> MB. Rahimsyah Setyo Adhie, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aprindo, 2015), h. 477

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 50

<sup>7</sup> Alwi, Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 65

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 1074

<sup>9</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 81

Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 adalah menelaah peran badan pengawas pemilihan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Provinsi Lampung tahun 2018 di Kota Bandar Lampung yang di tinjau dalam *fiqh siyasah*.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

- a. Agar Pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung berjalan dengan baik, tugas dan wewenang badan pengawas pemilu kota sangat berperan penting dalam pengawasan pemilu di kota Bandar Lampung.
- b. Meninjau tugas dan wewenang badan pengawas pemilu dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan fiqh siyasah.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang tugas dan wewenang badan pengawas pemilu dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.
- b. Tersedianya literatur dan saran yang mendukung penelitian dalam rangka menyelesaikan penelitian ilmiah ini.
- c. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah.



### C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.<sup>10</sup> Prinsip dasar kehidupan bernegara yang demokrasi yaitu setiap warga negara berhak aktif dalam proses politik, dalam hal ini negara demokrasi menggambarkan sebuah negara yang kekuasaan pemerintahannya berada ditangan rakyat yang dipersembahkan oleh rakyat dan kembali untuk rakyat. Wujud demokarsi yang dapat direalisasikan yaitu dengan melalu Pemilihan umum. Setiap warga negara bebas dalam menentukan pilihannya dan mengemukakan pendapatnya dalam pelaksanaan berdemokrasi. Dalam rangka pelaksanaan hak-hak warga Negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan yang telah ditentukan.<sup>11</sup>

Negara Indonesia pun merupakan negara yang banyak pulau-pulau dan daerah dimana dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang,<sup>12</sup> dengan ini pemerintahan daerah mempunyai keistimewaan dalam kewenangan yang dasarnya berada atau dimiliki oleh pemerintah pusat kemudian diserahkan atau dilimpahkan kepada daerah.<sup>13</sup>

Dalam pemilu tahun 2004 menjadi sejarah baru bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) yang secara

---

<sup>10</sup> Pasal 18 ayat (1) UUD 1945

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 416

<sup>12</sup> Tim Pengajar HTN FH UNILA, *Hukum Tata negara*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), h. 108

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

langsung ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.<sup>14</sup> Pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Yang dimana Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan kepala daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pesta demokrasi masyarakat Bandar Lampung diselenggarakan pada Tahun 2018 yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan akan berlanjut hingga tahun 2019 yakni Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten/kota sebelum berubah nama dahulu disebut dengan panitia pengawas pemilihan umum atau disingkat panwaslu kabupaten/kota. Adapun badan pengawas sebagai lembaga pengawasan yang mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan Pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung. Untuk mengupayakan pengwujudan pemilukada yang jujur, adil dan untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan Kepala Daerah, yang seharusnya masalah-masalah penegakkan hukum pemilihan umum kepala daerah harus diselesaikan secara komprehensif.

Didalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 diatur pada pasal 30, tugas dan wewenang dari Panwas Kabupaten/Kota adalah : huruf a yaitu dalam

---

<sup>14</sup> A.Ubaedillah& Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2013), h. 184

pemilihan Panwas mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi : (1). Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS, (2). Pemutakhiran data Pemilihan berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilihan sementara dan daftar pemilihan tetap, (3). Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan, (4). Proses dan penetapan calon, (5). Pelaksanaan kampanye, (6). Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya, (7). Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan, (8). Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih, (9). Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara, (10). Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK, (11). Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan, (12). Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan, dan (13). Proses pelaksanaan penetapan hasil terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota.

Huruf b menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan. Huruf c menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana. Huruf d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Huruf e meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang. Huruf f menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu

yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggaraan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota, huruf g mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang sedang berlangsung. Huruf h mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan. Huruf i melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan menerima laporan dugaan pelanggaran.

Dapat kita lihat dari tugas dan wewenang bawaslu Kabupaten/Kota pada pasal 30 huruf a yang dimana bawaslu melakukan Pengawasan dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan, tetapi pada pemilihan kepala daerah Provinsi Lampung kemarin terdapat isu bahwa adanya dugaan praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Provinsi Lampung 2018, yang dimana dilakukan oleh Pemenang pasangan nomor urut tiga yaitu pasangan calon Arinal dan calon wakilnya.<sup>15</sup> Karena adanya isu tersebut ada pro dan kontra dikalangan masyarakat Lampung untuk dilakukan ulang kembali pemilihan kepala daerah yang dimana terdapat pihak pro yang menyetujui harus adanya pemilihan ulang dan terdapat pihak kontra yang tidak ingin diulangnya pemilihan karena merasa bahwa isu tersebut hanya untuk menjatuhkan

---

<sup>15</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180727132256-32-317449/pemenang-pilkada-lampung-diduga-lakukan-politik-uang>, diakses pada tanggal 8 November 2018 pukul 14:02

pasanagan nomor urut tiga yang memenangkan pemilihan umum kepala daerah tahun 2018.

Dalam *fiqh siyasah* adapun dikenal dengan *syura* yaitu musyawarah yang artinya dasar pemerintah yang baik bahkan didalam Al-quran sendiri ada salah satu surat yang disebut dengan surat Al-Syura. Musyawarah ini juga telah dilakukan baik pada masa rasulullah maupun pada masa sahabat dan dasar dari musyawarah ini adalah jaminan kebebasan yang sempurna didalam menyatakan pendapat selama tidak menyinggung dari pokok-pokok akidah dan ibadah. Oleh karena itu, jelas bahwa dispotisme adalah musuh dari Islam.<sup>16</sup>

Mengingat kata despotisme merupakan hal yang dilarang, selain itu melakukan korupsi, penyuapan, dan pelanggaran-pelanggaran lain merupakan hal yang dilarang, karena hal tersebut tidak hanya merugikan negara tetapi juga merugikan rakyat, tetapi dalam kasus yang sudah terjadi di Indonesia banyak sekali kasus tentang korupsi dan dispotime dikalangan jajaran pemerintahan. Selain banyak kasus yang memuat unsur korupsi dan nepotisme, banyak juga kasus *money politic* atau *black campaign* dalam penyelnggaran pemilihan umum yang dimana kasus tersebut dilakukan oleh oknum-oknum peserta pemilu. Maka disini peran bawaslu kabupaten/kota sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenang seperti yang sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016.

---

<sup>16</sup> H. A. Djazuli, MA., *Fiqh Siyasah I,plementasi Kenaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2003), h.159



#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tugas dan wewenang bawaslu dalam pengawasan pemilihan kepala daerah Tahun 2018 Di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 terhadap tugas dan wewenang bawaslu dalam pemilihan kepala daerah provinsi lampung tahun 2018 di kota bandar lampung ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang bawaslu kabupaten/kota dalam pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2018 di kota Bandar Lampung.
  - b. Untuk menganalisis tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran bawaslu kota Bandar Lampung dalam pengawasan pemilihan kepala daerah provinsi Lampung tahun 2018 .
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan secara teoritis yaitu sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam *fiqh siyasah* terhadap undang-undang maupun peraturan pemerintah.
  - b. Kegunaan praktisnya yaitu untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam

menyelesaikan studi di fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Lampung.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.<sup>17</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>18</sup>

- b. Sifat Penelitian, Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskripsi analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.<sup>19</sup>

### 2. Data dan Sumber Data

- a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>20</sup> Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari

---

<sup>17</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 19

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 9.

<sup>19</sup> Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), h. 126.

<sup>20</sup> Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.

wawancara kepada responden yang merupakan ketua badan pengawas pemilu kabupaten/kota dari pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri. Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku, majalah ataupun media internet.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>21</sup> Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang berkaitan seperti ketua bawaslu atau jajaran staf bawaslu yang melakukan pengawasan dalam pilkada provinsi Lampung tahun 2018 di kota Bandar Lampung.

b. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>22</sup> Dalam

---

<sup>21</sup> Susiada AS, *Metode Penelitian*, Op., cit, h. 107

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 114

penelitian ini, yang dimaksudkan untuk mengamati secara langsung objek-objek yang diteliti yang berada di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.<sup>23</sup>

4. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena,<sup>24</sup> dengan memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan berbagai teori yang ada dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013, h. 198

<sup>24</sup> Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung : PT.Cipta Aditya Bakti, 2004), h. 127

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah* dan Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

###### a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk *mashdar* dari tashrifan kata *faqih*-*yaqfahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut : Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>25</sup> Terdapat istilah lain dari *fiqh siyasah* yang dikenal dengan ilmu tata Negara Islam atau ilmu tata negara dalam ilmua agama Islam.

Mengenai asal kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al- Arab* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siayasah* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Secara terminologis dalam *Lisan al-Arab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan dalam *Al-Munjid*

---

<sup>25</sup> Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam*, (Erlangga, 2008), h. 2



disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.<sup>26</sup>

Adapun Ibn ‘aqil sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim menakrifkan: “*Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudaratannya, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT. tidak menentukannya.”

Pengertian *fiqh siyasah*, adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa atau pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>27</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “peraturan perundang yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun menurut Louis Ma’luf memberikan batasan dimana *siyasah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka

---

<sup>26</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.22

<sup>27</sup> *Ibid*, h.

ke jalan keselamatan. Sementara Ibn manzhur mendefinisikan *siyasah* yang merupakan “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengatarkan manusia kepada kemaslahatan”.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

Dalam penjelasan dari *Fiqh Siyasah* telah dapat memberikan arahan yang cukup jelas terhadap sumber *Fiqh Siyasah*, yang dimana *fiqh siayasah* bersumber dari nash-nash Al-Quran dan Hadits, yang memberikan acuan dalam berlandaskan hukum Islam.

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai Kalam Allah Swt. yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dengan kata-kata berbahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw. dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh umat manusia dan sebagai amal ibadah bila dibaca.<sup>29</sup>

Allah Swt. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal., *Op. cit.*, h. 4

<sup>29</sup> H.Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4] : 59).

Seruan taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bgai manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Sunnatu’l-Lah telah menetapkan, bahwa di antara manusia ada para Rasul yang menyampaikan syari’at Allah kepada mereka, dan kita wajib menaati mereka.<sup>30</sup>

Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus dapat dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan didalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.

Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka dikembalikanlah kepada Al-Qur’an dan Hadis, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir karena orang mu’min tidak akan mengutamakan sesuatu pun atas hukum Allah, sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian-bagian duniawi. Disini terdapat isyarat bahwa orang yang lebih mementingkan hawa nafsu

---

<sup>30</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V*, Penerjemah : Bahrun Abu Bksr, Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), h. 119

dan keuntungan-keuntungan daripada mengikuti Al-Quran dan Hadis, bukanlah orang mu'min yang sebenarnya. Dan pengembalian sesuatu kepada Allah dan Rasul-Nya itu lebih baik bagi kalian, karena hal itu merupakan asas yang lebih kokoh.<sup>31</sup>

Dalam *fiqh Siyasah*, *Amar ma'ruf nahi mungkar* dan kontrol sosial berdasarkan agama sangat diperlukan untuk mencegah yang salah dan memilih yang benar serta membuang yang salah bila disadari atau tidak.<sup>32</sup>

#### b. Al-Sunnah

Selain Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum dalam *fiqh siyasah* adapun sunnah yang juga digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah: Hal-hal yang datang dari Rasulullah Saw, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan.<sup>33</sup> Adapun dasarnya, dinyatakan oleh Rasulullah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَ هُمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam : ‘Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangkiku di Telaga (di Surga).” (HR. al-Baihaqy).

## 2. Ruang Lingkup Kajian *Fiqh Siyasah*

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 121

<sup>32</sup> Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Op.cit.*, h. 15

<sup>33</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 1993), H. 47

Terdapat beberapa pendapat kalangan ulama dalam ruang lingkup kajian *Fiqh siyasah* yang diantaranya ada yang terbagi menjadi lima bidang, ada yang mempersempitnya menjadi tiga bidang, dan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut Imam al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara).<sup>34</sup>

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* terbagi menjadi tiga, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara. Sementara menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* meenjadi delapan bagian, yaitu :<sup>35</sup>

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan),
- 2) *Siyasah Tasr'iyah Syari'iyah* (Politik Hukum),
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan),
- 4) *Siyasah Maliyyah Syari'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter),
- 5) *Siyasah Idariyyah Syari'iyah* (Politik Administrasi Negara),
- 6) *Siyasah Dauliyyah Syari'iyah / Siyasah Kharijiyyah Syari'iyah* (Politik Hubungan Internasional),

---

<sup>34</sup>Muhammad Iqbal., *Op. cit.*, h. 14

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 15

7) *Siyasah Tanfidziyyah Syari'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan),

8) *Siyasah Harbiyyah Syari'iyah* (Politik Peperangan).

3. Prinsip – Prinsip dan Kaidah-Kaidah Pemerintahan dalam *Fiqh Siyasah*

a. Prinsip – Prinsip Pemerintahan dalam *Fiqh Siyasah*

Islam adalah agama yang sempurna dan amat lengkap sebagai suatu sistem kehidupan yang tidak saja meliputi tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga sistem politik termasuk bentuk dan ciri-cirinya, sistem pemerintahan dan sebagainya. Al-Quran dan sunnah sebagai dasar hukum Islam menetapkan dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya. Selain itu Islam menetapkan prinsip-prinsip dalam ketatanegaraan dan pemerintahan, prinsip-prinsip tersebut,<sup>36</sup> yaitu :

1) Prinsip Persatuan dan Persaudaraan

Suatu bangsa, umat, dan negara tidak akan berdiri tegak bila di dalamnya tidak terdapat persatuan dan persaudaraan warganya. Persatuan dan persaudaraan ini tidak akan terwujud tanpa saling bekerja sama dan mencintai. Setiap jamaah yang tidak diikat oleh ikatan kerja sama dan kasih sayang serta persatuan yang sebenarnya, tidak mungkin bersatu dalam satu prinsip untuk mencapai tujuan bersama. Persatuan dan persaudaraan suatu umat atau jamaah merupakan fondasi dan faktor-faktor terbentuknya sebuah negara.<sup>37</sup>

Dalam Firman Allah Swt. :

---

<sup>36</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Op., cit., h. 209

<sup>37</sup> J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 142



إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S Al-Hujurat [49] : 10)

Persamaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah persaudaraan yang berdasarkan agama. Pernyataan Allah tentang persaudaraan orang-orang mukmin tidak dibenarkan di antara mereka terjadi pertengkaran, perselisihan, pembunuhan, dan penindasan, serta membedakan atau mengistimewakan sebagian atas sebagian yang lain.

Persaudaraan itu mengajarkan mengajarkan suatu prinsip keyakinan yang tidak membedakan antara bangsa-bangsa, ras, dan sebagainya. Prinsip ini mengajarkan persaudaraan dalam hal yang sangat luas yang dimana meliputi semua golongan manusia. Baik dalam Piagam Madinah ketetapan yang mewujudkan persatuan dan persaudaraan di kalangan penduduk Madinah juga menggambarkan bentuk hubungan antara golongan Islam dan Non-Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi tidak membentuk persatuan dan persaudaraan yang eksklusif bagi umat Islam saja.<sup>38</sup>

Di zaman modern ini setiap pemerintahan suatu negara memandang prinsip persatuan dan persaudaraan merupakan hal yang

---

<sup>38</sup> J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Ibid., h. 143

harus dibina dan ditegakkan sebagai persyaratan bagi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang.<sup>39</sup>

## 2) Prinsip Kebebasan

Kebebasan merupakan hak dasar hidup setiap orang dan merupakan pengakuan seseorang atau kelompok atau persamaan dan kemuliaan harkat kemanusiaan orang lain. Kebebasan semakin dibutuhkan oleh setiap orang yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang terdiri dari golongan yang beraneka ragam baik dari segi etnis, kultur, agama, keyakinan, maupun ekonomi. Bila kebebasan dibelenggu, maka yang akan terjadi adalah penindasan satu golongan terhadap golongan lain. Kebebasan membuat setiap orang atau golongan merasa terangkat eksistensinya dan dihargai harkat kemanusiaannya di tengah-tengah kemajemukan umat.

Karena itu prinsip kebebasan mutlak perlu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya guna terjaminnya keutuhan masyarakat pluralistik. Ada beberapa kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan manusia yaitu, kebebasan beragama, kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan bergerak, kebebasan dari penganiayaan, dan masih banyak lagi.<sup>40</sup>

## 3) Prinsip Hidup Bertetangga

---

<sup>39</sup> J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran, Ibid.*, h. 149

<sup>40</sup> J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran, Ibid.*, h. 156.

Prinsip Pemerintahan yang menjangkau luas tidak hanya mengatur tentang masalah dalam komunitas penduduk dalam kehidupan sosial secara umumnya saja, tetapi juga mengatur secara khusus tentang hubungan atau pergaulan hidup bertetangga.

Mereka yang bertetangga harus saling menghormati, tidak boleh saling menyusahkan dan saling melakukan perbuatan jahat. Setiap rumah tangga atau keluarga harus memperlakukannya seperti diri sendiri. Sebab, keharmonisan hubungan dan pergaulan dalam hidup bertetangga menjadi sendi bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat suatu negara, terlebih lagi dalam masyarakatnya yang bercorak majemuk.

Dalam hal ini baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh maupun tetangga itu dari keluarga muslim, keluarga nsarani, maupun keluarga musyrik, setidaknya haruslah diperlakukan dengan baik dan hak-haknya harus dihormati. Atas dasar ini, maka ketetapan bersifat global yang dimana tidak hanya mengatur kehidupan bertetangga dikalangan masyarakat saja tetapi juga mengatur kehidupan bertetangga antar komunitas-kommunitas yang menetap di luar negara (*city-state*).<sup>41</sup>

Dalam catatan sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW mengadakan perjanjian dan menjalin hubungan persahabatan dengan komunitas-komunitas yang menetap di luar kota Madinah serta menghormati hak-

---

<sup>41</sup> J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Ibid., h. 187

hak mereka. Tidak hanya itu dengan sikap Nabi yang bersahabat dan cinta perdamaian, menjalin hubungan damai dan persahabatan dengan tetangganya yang hampir semua kelompok masyarakat yang ditinggal di Jazirah Arab.<sup>42</sup>

Jika dalam suatu negara mempraktikkan dan mengikuti Prinsip hidup bertetangga ini, tidak hanya terwujudnya ketertiban dan kemandirian serta kesejahteraan bersama tetapi juga menjadikan beberapa negara yang berdekatan atau bertetangga menjalin hubungan kerja sama yang baik, tidak adanya saling mengganggu, dan tidak saling mencampuri urusan dalam negaranya masing-masing.

#### 4) Prinsip Perdamaian

Perdamaian merupakan ajaran dasar yang penting dalam Islam untuk mempererat persatuan dan solidaritas antar sesama manusia baik antar kelompok sosial maupun antar bangsa, sehingga terciptanya hubungan yang baik dan kerja sama yang saling menguntungkan. Dalam hubungan ini Al-Maududi menyatakan : “Muslimin dianjurkan hidup damai dan bersahabat. Jika kelompok non-Muslim memperlihatkan sikap bersahabat dan damai, Muslimin juga harus bersikap ramah dan bersahabat dengan mereka. Berurusan secara jujur dan adil.”<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Ibid., h. 188

<sup>43</sup> J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Ibid., h. 204

Ini merupakan suatu prinsip dalam Islam bahwa Allah melarang orang-orang mukmin melanjutkan permusuhan terhadap musuh yang sudah mau berdamai dan menyerah. Sebab, Islam tidak membolehkan umatnya melanggar hak orang lain kecuali terhadap orang yang melanggar hak mereka, dan tidak pula memerangi mereka.

Dalam catatan sejarah Islam, terdapat praktek Nabi dan umat Islam mengadakan perdamaian dengan pihak non-Muslim, seperti dengan pihak kaum musyrik dan kaum Yahudi. Dengan pihak kaum musyrik dikenal dengan *shulh al-Hudaibiyyat* (perjanjian Hudaibiah) pada tahun 6 H. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian damai antara umat Islam dan kaum musyrik.

Tidak lama setelah perjanjian Hudaibiah, Nabi kemudian menerima perdamaian dari kaum Yahudi yang menetap di Khaibar. Perdamaian ini terjadi karena kekalahan dari pihak kaum Yahudi Khaibar saat bertempur habis-habisan dengan kaum Muslimin. Sementara kaum Yahudi di Fadak, setelah mendengar kekalahan Yahudi Khaibar, segera membuat persetujuan damai dengan menyerahkan separuh harta benda mereka tanpa terjadi pertempuran sebelumnya. Demikian juga dengan kaum Yahudi di Taima menyerah sebelum terjadi pertempuran dan mereka bersedia membayar jizyah (pajak).<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Ibid., h. 208

Karena itu perdamaian merupakan syarat utama terlaksananya hubungan baik dan langgeng antara kelompok-kelompok sosial dan antar bangsa. Perdamaian dalam Islam bersifat universal, tanpa batas, dengan siapa pun boleh dilaksanakan.

##### 5) Prinsip Pelaksanaan Hukum

Perintah berlaku adil yang berkaitan dengan berbuat *ihsan* (kebaikan), larangan berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan bertujuan supaya keadilan bisa terwujud. Berbuat kebaikan berarti memenuhi dan melaksanakan hukum-hukum yang berlaku. Bila hukum terlaksana, maka keadilan pun akan terpenuhi. Memberi kepada kaum kerabat berarti memenuhi hak-hak mereka, baik lahir maupun batin secara seimbang. Larangan berbuat keji, kemunkaran, dan permusuhan berkaitan dengan terpeliharanya hak-hak dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terpeliharanya hak-hak orang lain.

Bidang aktivitas hidup manusia lain yang dituntut oleh al-Quran dari setiap orang yang berlaku adil adalah bidang takaran dan timbangan, yaitu menyempurnakannya dengan adil. Penimbangan atau penakar harus menakar atau menimbang sesuatu secara jujur. Ia tidak boleh mengurangi sedikit pun yang menjadi hak orang lain, sehingga terhindar dari perselisihan dan buruk sangka orang lain terhadapnya.<sup>45</sup>

Demikian dalam kehidupan sosial dan politik, orang-orang mukmin diperintahkan agar mendamaikan dua golongan mukmin yang

---

<sup>45</sup> J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Ibid., h. 229



berkonflik atau berperang dengan adil dan memulihkan hak-hak masing-masing secara seimbang. Orang mukmin juga diperintahkan berbuat baik dan memberi apa yang menjadi hak dan bagian terhadap golongan non-muslim yang tidak memerangi dan mengusir mereka karena alasan agama, karena Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.<sup>46</sup>

Prinsip penetapan hukum ini sudah diterapkan pada masa zaman Nabi menjadi khalifah, yang dimana konstitusi pertama yaitu Piagam Madinah yang secara konstitusional mempunyai dasar hukum untuk menindak peserta perjanjian yang melakukan makar yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat.

#### 6) Prinsip Kepemimpinan

Dalam kehidupan bersama diperlukan adanya pemimpin, karena agar kehidupan bersama itu berjalan sebagaimana semestinya dan suatu perjanjian dapat dilaksanakannya. Dalam suatu masyarakat yang teratur, jika timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mesti ada penyelesaian mekanisme pemimpin dengan fungsinya yang jelas, ataupun untuk menggerakkan masyarakat itu supaya mengambil keputusan, dan ataupun yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kesepakatan bersama.

Tugas seorang pemimpin yang dimana merupakan pemegang kekuasaan dalam pemerintahan selain menyelesaikan perbedaan

---

<sup>46</sup> J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Ibid., h. 230

pendapat dan perselisihan di kalangan rakyatnya tetapi seorang pemimpin juga harus berwibawa dan tidak bertindak otoriter.

#### 7) Prinsip *Amar Makruf*, dan *Nahi Munkar*

Dalam prinsip ini menuntut pemerintah harus mempunyai kepedulian sosial, baik untuk tugas amar makruf maupun tugas nahi munkar. Tujuan pemerintahan itu ialah mewujudkan hak atas kesejahteraan dunia dan melarang apa yang diharamkan. Dengan demikian masyarakat dan pemerintahan bergerak di atas jalan yang di ridai Allah.<sup>47</sup>

Kewajiban seorang mukmin adalah menyuruh dan mengajak mukmin lain melakukan perbuatan baik dan mencegahnya dari perbuatan munkar. Karena tugas *amar makruf nahi munkar* merupakan identitas umat Islam sebagai umat terbaik.

Dalam Firman Allah Swt. :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ  
مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali Imran [3] : 110)

---

<sup>47</sup> J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Ibid., h. 262

Dalam ayat ini kewajiban umat Islam saling menyeru kepada kebaikan, saling menyuruh kepada makruf dan saling mencegah dari yang munkar. Mukmin mempunyai hak untuk menasihati mukmin lainnya supaya mengikuti perilaku yang benar dan mencegahnya dari perbuatan salah atau dosa.<sup>48</sup>

Prinsip *amar makruf nahi munkar* harus di implementasikan sebagai salah satu prinsip konstitusi atau perundang-undangan negara yang dilaksanakan secara konsekuen dan efektif. Agar pemerintah menjalankan kepentingan terbaik negara dan melaksanakan tugas *amar makruf* dan *nahi munkar* dengan baik sebagai cerminan ketakwaan.

#### 8) Prinsip Musyawarah

Al-Quran memerintahkan musyawarah dan menjadikannya sebagai unsur dari unsur-unsur pijakan Negara Islam. Adapun Firman Allah Swt. :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura [42] : 38).

Ayat diatas terdapat dalam surat Makkiyah, mengandung satu sifat rakyat yang baik, dan menyatakan bahwa musyawarah termasuk di antara ciri khas dan merupakan metode hidup. Kata musyawarah

---

<sup>48</sup> J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Ibid., h. 263

dalam realitanya lebih luas maknanya daripada demokrasi, sebab demokrasi terkadang hanya bentuk parlementer, sedangkan musyawarah adalah metode hidup dalam setiap lembaga pemerintahan mulai dari penguasa sampai rakyat biasa.<sup>49</sup>

Nabi Muhammad SAW sebagai contoh yang teladan telah membudayakan praktik musyawarah di kalangan sahabat-sahabatnya. Beliau seringkali bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk meminta saran dan pendapat mereka dalam soal-soal kemasyarakatan dan ketatanganan. Ketika Nabi membawa berita bahwa kaum Quraisy telah meninggalkan kota Makkah untuk berperang melawan kaum muslimin, beliau belum menetapkan sikap kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari kaum Muhajirin dan Ansar. Untuk itu beliau bermusyawarah dengan mereka untuk membicarakan kondisi mereka, seperti belanja perang, dan jumlah pasukan mereka. Beliau meminta sikap dan pendapat kaum Ansar sebagai golongan terbesar kaum muslimin dalam menghadapi perang tersebut. Dan beliau mendapatkan dukungan dari kaum Ansar dan mereka bersedia mengorbankan segalanya demi perjuangan Nabi Muhammad SAW.<sup>50</sup>

Tidak melakukan musyawarah adalah tindakan kesewenang-wenangan yang terlarang. Itu menunjukkan bahwa Allah Swt.

---

<sup>49</sup> Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 52

<sup>50</sup> J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Op.,cit., h. 209

Menghendaki politik kaum muslimin ini berjalan berdasarkan prinsip musyawarah, tidak seorang pun yang merasa dizalimi.<sup>51</sup>

#### 9) Prinsip Berlaku adil

Berlaku adil adalah pilarnya negara dan merupakan dasar kewenangan. Berlaku adil ini dibebankan kepada para penguasa juga kepada pemerintahan. Dalam Firman Allah Swt. :



"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS. An-Nisa [4] : 58).

Ayat yang turun perihal ulil amri ini menerangkan bahwa mereka (ulil amri) harus menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu perkara umum yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Dan apabila mereka menetapkan hukum diantara manusia, dia harus menetapkan dengan adil. Kesimpulannya bahwa tujuan penguasa atau pemerintah dengan keputusannya tersebut adalah memberikan hak kepada yang berhak.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Ibd., h. 51

<sup>52</sup> J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Ibd., h.202

Menegakkan keadilan adalah kewajiban syariat bagi orang-orang mukmin berdasarkan iman kepada Allah Yang Maha Adil, sebagai tindakan persaksiannya. Dalam upaya penegakkan keadilan, siapa saja yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk memimpin orang lain, kepemimpinannya harus berfungsi untuk menegakkan keadilan dan harus berperilaku adil, dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya menegakkan keadilan. Bahkan dalam unit sosial sekecil apapun keadilan harus ditegakkan.

Seluruh umat muslimin diperintahkan untuk berlaku adil dalam segala hukum, perkataan, perbuatan, dan sopan santun. Sebagaimana mereka juga diamanatkan untuk berlaku adil dalam berpolitik, keagamaan, dan melaksanakan kewenangan negara.

#### 10) Prinsip Persamaan

Nash-nash Al-Quran dan hukum-hukumnya telah menuturkan dengan menetapkan “persamaan hak”. Sebagaimana Allah memerintahkan berlaku adil, Allah juga menetapkan persamaa hak antara manusia seluruhnya, didalam surah-surah makkiyah dan madaniyah, dan adil dalam bahasa artinya penyamarataan.

Persamaan antara manusia menjadi dua dasar untuk tidak menjadikan perbedaan mereka dalam jenis, warna kulit, dan keturunan sebagai tolak ukur keutamaan atau permusuhan, sebab kebijaksanaan Allah telah memutuskan bahwa maksud perbedaan ini



adalah untuk saling mengenal dan saling membantu antara umat dan bangsa.<sup>53</sup>

Allah Swt. Berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat [49] : 13).

Allah menjadikan takwa kepada-Nya sebagai tolak ukur keutamaan atau kemuliaan di sisi-Nya. Di antara sikap takwa kepada-Nya adalah berbuat baik dan berlaku adil di antara manusia. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, juga tidak ada perbedaan antara orang yang miskin dan orang yang kaya, semua di sisi Allah adalah sama.

b. Kaidah-Kaidah Pemerintahan dalam *Fiqh Siyasah*

Dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyah*, yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kepentingan umum. Tujuan yang hendak dicapai dalam penentuan hukum adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.<sup>54</sup> Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan suatu negara dalam Islam, seluruh pihak harus terlibat,

<sup>53</sup> J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Ibid., h. 222

<sup>54</sup> H. Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), H. 80

baik negarawan, intelektual, ulama, ekonom, militer, pengusaha, cendekiawan, maupun rakyat, karena urusan negara mencakup seluruh persoalan umat.

1) الضَّرَرُ يُزَالُ (Yang Berbahaya Itu Dihilangkan)

Kaidah الضَّرَرُ يُزَالُ mempunyai arti bahwa seluruh yang menimbulkan bahaya harus dilenyapkan.<sup>55</sup> Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus jauhkan dari *idharar* (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) orang lain. Mudarat tidak bisa hilang dengan kemudharatan lain.<sup>56</sup>

Kaidah ini penting dalam pengembangan hukum Islam. Kaidah ini berlaku secara luas dalam berbagai objek kajian fiqh. Tidak terhitung banyaknya ketetapan hukum fiqh yang menerapkan kaidah ini, baik ketetapan hukum mengenai pemeliharaan manfaat maupun penolakan kerusakan atau bencana, bahkan termasuk juga pemeliharaan kemaslahatan dlaruriyat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, nasab, harta, dan kehormatan.<sup>57</sup>

Upaya pemerintah dalam pembentukan dan pembaharuan hukum dengan kaidah ini akan menghasilkan hukum yang berkeadilan. Karena pembentukan dan perumusannya sudah

---

<sup>55</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), H.159

<sup>56</sup> Nurhayati, Ali Imran Siaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, H. 72

<sup>57</sup> Bunyana Sholihin, *loc.*, *cit*

mengacu pada menghilangkan yang berbahaya, baik yang berbahaya bagi diri sendiri dan yang berbahaya bagi orang lain.<sup>58</sup>

2) تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ (Tindakan Atau Kebijakan Pemerintahan Terhadap Rakyat Tergantung Kepada Kemaslahatan)

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus sesuai dengan pertimbangan dan apresiasi rakyatnya. Jika apresiasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak berlaku efektif. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri.<sup>59</sup>

Tindakan dan kebijaksanaan yang mendorong berkembangnya prakarsa dan kreativitas rakyat untuk memenuhi kesejahteraannya sendiri. Dalam kaitan ini, berdasarkan kaidah ini, dibutuhkan pemimpin negara yang kepemimpinannya dapat diterima (akseptabel) dan mampu memikul tanggung jawab yang diberikan (kapabel). Tetapi apabila tidak ada calon yang memenuhi dua persyaratan ini, calon yang hanya akseptabel atau hanya kapabel boleh diterima. Alternatif ini menghindari tidak terjadinya kekacauan dan kesulitan negara, selama belum ditemukan calon pemimpin yang kapabel sekaligus akseptabel.<sup>60</sup>

3) لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (Tidak Boleh Membuat Bahaya dan Membalas perbuatan bahaya kepada orang lain).

---

<sup>58</sup> Bunyana Sholihin, *Ibid.*, h. 222

<sup>59</sup> H. Muhammadong, *op.*, *cit.*, h. 83

<sup>60</sup> J. Suyuthi Pulungan, *op.*, *cit.*, h. 41-42

Kaidah ini melarang berbuat bahaya (ضرر), hadis yang periwayatannya sesuai dan menjadi dasar dari Kaidah ini adalah hadis yang di riwayatkan oleh Al-Hakim dari Abi Sa'id al-Hudri :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. مَنْ ضَارَّ ضَرَّاهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

“Dari Abi Sa'id Sa'd bin Mâlik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Tidak boleh berbuat bahaya dan membalas perbuatan bahaya kepada orang lain, bagi siapa yang berbuat bahaya kepada orang lain maka Allah akan berbuat bahaya kepada orang tersebut, dan bagi siapa yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkan orang tersebut.” (HR. Al-Hakim)<sup>61</sup>

Pada dasarnya segala bentuk tindakan membahayakan terhadap orang lain dapat tersentuh oleh hukum kaidah ini. Manusia dilarang berbuat bahaya terhadap orang lain dan diperintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu yang bernyawa terutama terhadap manusia.<sup>62</sup>

#### 4. Lembaga Pengawasan dalam *Fiqh Siyash*

Dalam pengertiannya pengawas merupakan berasal dari kata “awas” yang berarti penjagaan. Dan istilah pengawasan yang dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yang berarti sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Anglo Media, 2004), H. 127

<sup>62</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Ibid.*, h. 130

<sup>63</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 10

Hak Mengawasi atau Mengontrol (*Haqq al-Muraqabat*) pada dasarnya pengawasan / pengontrolan rakyat atas penguasa bukan saja hak akan tetapi kewajiban, seperti halnya rakyat yang mengawasi penguasanya sebagaimana pemberi kuasa berhak mengawasi yang diberi kuasa. Pengawasan/pengontrolan merupakan bagian dari amar makruf nahi munkar yang harus dilaksanakan dengan adab-adab tertentu. Diantara adab-adab tersebut yaitu, dimulainya dengan cara yang lemah lembut, dan nahi munkar tidak boleh menimbulkan kemunkaran yang lebih besar.<sup>64</sup> Tanggung jawab bersama dalam mengubah kemunkaran dan memastikan prinsip pengawasan tetap harus dikerjakan. Menutup semua pintu kerusakan dan mencari segala kemaslahatan atau *amar ma'ruf nahi munkar* adalah termasuk inti tugas pengawasan terhadap orang-orang yang memiliki kekuasaan.<sup>65</sup>

Inilah yang menjadikan pengawasan di anjurkan yang dimana untuk mencegah terjadinya kemunkaran dan diantara kewajiban yang fundamental dalam Islam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Adapun dalam hal pemilihan umum diadakannya pengawasan untuk merubah kemunkaran seperti menyerahkan uang sogok, menerimanya dan melantarkannya merupakan kemunkaran yang amat mungkar, Jual beli suara (*money politic*) dalam pemilu termasuk dalam kategori *risywah* yang serupa dengan tindakan korupsi. *Risywah* digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok,

---

<sup>64</sup> <https://marhamahsaleh.wordpress.com/fiqh-siyasah/>, diakses pada 5 Desember 2018 pukul 17:06 wib.

<sup>65</sup> Farid Abdul Khaliq, *op. cit*, h. 42

menipu, memeras, dan termasuk jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu.<sup>66</sup> Sama halnya dengan memanipulasi hasil pemilihan umum merupakan kemungkaran yang amat mungkar, tidak memberikan kesaksian terhadap hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum merupakan kemungkaran yang sangat mungkar, karena hal ini merupakan kebohongan dan menyembunyikan kesaksian.<sup>67</sup>

Sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran merupakan hak setiap orang dan bahkan merupakan kewajiban.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)

“Barang siapa diantaramu menghadapi perkara munkar, maka hendaklah merubah dengan tindakan/kekuasaannya, dan jika tidak kemampuan, maka hendaklah dengan nasehatnya, dan jika tiada kemampuan pula, maka hendaklah dengan keimanan hatinya, itulah selemah-lemahnya iman. (HR. Muslim).”<sup>68</sup>

Dalam hadis ini Rasulullah Saw. memerintahkan kepada semua orang muslim dari mereka yang melihat suatu kemungkaran agar merubahnya dengan menggunakan tangan, jika memang sanggup melakukannya.<sup>69</sup> Jika tidak sanggup, bisa menggunakan lidah dan keterangan. Jika tidak sanggup merubah dengan lidah, dia harus beralih ke cara yang paling

---

<sup>66</sup> <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186>, M. Hasbi Umar, *Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu* dalam *Perspektif Siyasi*, AL- ‘Adalah Vol. 12 No. 2, 2014, h. 262

<sup>67</sup> Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Penerjemah: Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 128

<sup>68</sup> Alhafidh, Masrap Suhaemi BA, *Tarjamah Riadhus Shalihin*, (Surabaya: Mahkota, 1986) h. 124

<sup>69</sup> Yusuf Al-Qardhawy, *op. cit.*, h. 169



rendah, yaitu merubah dengan hatinya.<sup>70</sup> Ulama Fiqh sepakat bahwa prinsip *amar makruf nahi munkar* telah muncul dan sejalan dengan di turunkannya syariat Islam kepada Rasulullah SAW.<sup>71</sup>

Adapun lembaga yang terkait untuk menangani pelanggaran amar makruf nahi munkar, yaitu *Wilayah al-hisbah* dan *Wilayah al-mazalim*. *Wilayah al-hisbah* merupakan salah satu lembaga peradilan Islam yang khusus menangani kasus moral dan berbagai bentuk maksiat. Wewenang al hisbah lebih menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan rida Allah SWT.

Menurut kesepakatan ahli fiqh, wewenang *wilayah al-hisbah* meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip amar makruf nahi munkar, diluar wewenang *qadi* atau *wilayah al-mazalim*, baik yang berkaitan dengan pelanggaran esensi dan pelaksanaan ibadah maupun menyangkut akidah.

Pada masa Rasulullah SAW kasus-kasus *al-hisbah* langsung ditanganinya, meskipun pelaksanaan eksekusi hukumannya kadang-kadang didelegasikan kepada sebagian sahabat. Sahabat-sahabat yang pernah diberi tugas untuk menangani pelanggaran amar makruf nahi munkar antara lain Ali bin abi Talib, dengan tugas menghancurkan seluruh berhala serta bangunan kuburan di Madinah, dan Sa'id bin As dengan tugas mengawasi pasar.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Yusuf Al-Qardhawy *Ibid.*, h. 129

<sup>71</sup> *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1982) h. 1939

<sup>72</sup> *Ensiklopedia Hukum Isla*, *Ibid.*, h. 1940

Pada masa Bani Ummayah *wilayah al-hisbah* merupakan kekuasaan kehakiman yang berhubungan dengan pelanggaran ringan, seperti kecurangan dalam perdagangan dan penipuan dipasar, berhubungan dengan *al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum perdata/keluarga), adapun untuk *wilayah al-mazhalim* ya menangani tindakan pejabat-pejabat negara yang berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat.<sup>73</sup>

*Wilayah al-mazhalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan dzalim para penguasa pejabat, dan keluarganya, untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan sengketa antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksud dengan penguasa menurut al-Mawardi, adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.<sup>74</sup>

## **B. Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016**

### **1. Pengertian Pengawas Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016**

Sejak Agustus Tahun 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya di singkat Panwaslu Kabupaten/Kota berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Bawaslu Kabupaten/Kota. Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota yang

---

<sup>73</sup> Muhammad Iqbal., *Op. cit.*, h. 93

<sup>74</sup> *Ensiklopedia Hukum Islam, Op. cit.*, h, 1941

selanjutnya disebut bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.<sup>75</sup>

Dalam kode etik: pemilihan dan pengamatan Profesional (International IDEA), *supervision involves the process of certifying the validity of all or some of the steps in election processes* (Pengawasan pemilihan umum melibatkan proses sertifikasi keabsahan untuk semua atau beberapa langkah dalam proses pemilihan), dan menurut *guideline for African Union electoral observation and monitoring mission*, pengawas pemilihan umum adalah *supervision and audit involves the process of certifying the validity of all some of the steps election processes either prior or after election take place* (Pengawasan dan audit melibatkan proses sertifikasi keabsahan semua beberapa langkah proses pemilihan baik sebelum atau sesudah pemilihan berlangsung).<sup>76</sup>

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sudah sesuai dengan semestinya atau tidak. Dan Sujamto mengembalikan pengertian pengawas kepada kata dasar dalam bahasa Indonesia, yaitu awas yang berarti berarti bahwa “mampu mengetahui secara cermat dan seksama”.<sup>77</sup> Jadi tujuan pengawasan yang semestinya dari pengertian ini adalah tolak ukur yang mengandung tiga segi, yaitu : sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,

---

<sup>75</sup> Pasal 1 ayat (17), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

<sup>76</sup> Gunawan Suswantoro, *Mengawal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, (Penerbit Erlangga, 2016), h. 109

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 78

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektifitas).

Adapun menurut Sujamto tujuan daripada pengawasan ialah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jadi dapat dilihat dari tujuan pengawasan adalah untuk menilai kenyataan yang telah terjadi dan dibandingkan dengan yang seharusnya terjadi, sehingga akan terlihat apakah hasil yang dicapai telah memenuhi apa yang seharusnya. Bila terjadinya penyimpangan maka akan mudah terkontrol dan cepat diperbaiki.<sup>78</sup>

Secara terminologi, kata “pengawasan” dalam disiplin ilmu administrasi, tidak dapat dipisahkan dari kata perencanaan. Menurut Sondang P. Siagian pengawasan terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, dimana tanpa rencana pengawasan tidak akan mungkin dilakukan karena tidak adanya pedoman untuk melaksanakan pengawasan itu dalam proses pengamatan pada pelaksanaan dalam seluruh kegiatan organisasi dimana untuk menjamin agar semua pekerjaan atau kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.<sup>79</sup>

Kata “pengawasan” memiliki relevansi dengan fungsi-fungsi manajemen dalam ilmu administrasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>78</sup> Gunawan Suswantoro, *Ibid.*, h. 79

<sup>79</sup> Sondang P Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: CV Gunung Agung, 1985), h. 135

“tanpa perencanaan tidak mungkin dapat melakukan pengawasan, dengan hal ini rencana tanpa pengawasan akan memberi peluang untuk timbulnya penyimpangan-penyimpangan tanpa ada alat yang dapat dipergunakan untuk mencegahnya”. Jika kata pemilihan umum dikaitkan dengan kata pengawasan dapat diartikan yaitu sebuah proses pengamatan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pemilihan umum untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan dalam pemilihan umum berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2. **Dasar Hukum Pengawas Pemilihan Umum Undang-Undang No. 10 Tahun 2016**

Upaya dalam melakukan pencegahan dan pengawasan setiap tahapan pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Lampung Tahun 2018 di Kota Bandar Lampung dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tahapan-tahapan pemilihan. Peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan pengawasan tahapan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Wali Kota serta Walikota dan Wakil Walikota;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Wali Kota serta Walikota dan Wakil Walikota;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

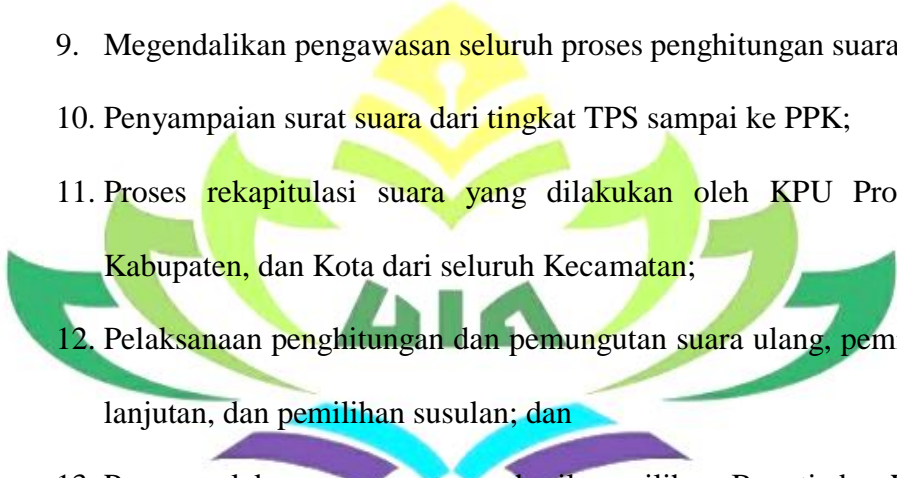
3. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016

Tugas dan wewenang badan pengawas pemilu kabupaten/kota pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 sudah di atur dalam dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2016, yaitu:<sup>80</sup>

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi :
  1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
  2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
  3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
  4. Proses dan penetapan calon

---

<sup>80</sup> Pasal 30, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

- 
5. Pelaksanaan kampanye;
  6. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan;
  8. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
  9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
  10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
  12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan; dan
  13. Proses pelaksanaan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan menegani pemilihan;
  - c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
  - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
  - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
  - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya

dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

### **C. Pemilihan Kepala Daerah**

#### **1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.<sup>81</sup>

Menurut Moh Kusnardi dan Harmily Ibrahim, pemilihan umum bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara

---

<sup>81</sup> Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

aman dan tertib, untuk melaksanakan kedualatan rakyat dan melaksanakan hak rakyat. Dan menurut Dahlan Thaib, pemilihan dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi.<sup>82</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemilihan umum dalam pemilihan kepala daerah merupakan kegiatan politik dalam proses pergantian kepala daerah yang dilaksanakan secara berkala dan berdasarkan konstitusi.

Kepala Daerah yaitu kepala daerah pada umumnya, seperti gubernur, bupati, dan walikota madya, serta DPRD.<sup>83</sup> Kepala daerah adalah kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah tersebut yang dilakukan secara langsung, untuk provinsi pemilihan kepala daerah yang di dipilih untuk menduduki jabatan sebagai Gubernur dan dibantu oleh wakil kepala daerah, disebut wakil gubernur.<sup>84</sup> Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi kepala daerah berkewajiban memberikan keterangan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan pemerintahan daerah yang dipimpinnya kepada DPRD.

---

<sup>82</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h. 157

<sup>83</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143

<sup>84</sup> H.Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 55



Dalam konteks pemerintahan daerah, kepala daerah merupakan jabatan politik sekaligus jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi untuk menggerakkan jalannya roda pemerintahan, dalam fungsi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Sedangkan jika ditinjau dari struktur kekuasaan, kepala daerah adalah kepala eksekutif di daerah, untuk menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut.<sup>85</sup> Pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah dalam Undang-Undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung.<sup>86</sup>

## 2. Asas – Asas Pemilihan Kepala Daerah

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,<sup>87</sup> berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Langsung : Rakyat melakukan pemilihan secara langsung tanpa perantaraan orang lain.<sup>88</sup>

Umum : Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan tertentu berhak memilih.

Bebas : ialah bahwa untuk melakukan pemilihan, dijamin keamanan si pemilih tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun/ dengan cara apa pun.

---

<sup>85</sup> U.J. Kaioh, *Demokrasi dan Kearifan Lokal Pada Pilkada Langsung*, (Jakarta: Kata Hasan Pustaka, 2008), h. 2

<sup>86</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Gubernur, Kedudukan Peran Dan Kewenangannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 134

<sup>87</sup> H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2008), h.130

<sup>88</sup> Suparto, *Tata Negara 2*, (Bandung : Empat Saudara, 1984), h. 125

Rahasia : ialah bahwa para pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun, siapa yang dipilihnya.<sup>89</sup>

Jujur : mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga Negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilihan memiliki nilai yang sama untuk menentukan kepala daerah yang akan terpilih.

Adil : adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilihan umum dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih atau peserta pemilihan umum, tetapi juga kepada penyelenggara pemilihan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> R. Erman Muchjidin, *Tata Negara*, (Jakarta: Yudhistira, 1987), h. 116

<sup>90</sup> Gunawan Susanto, *Pengawasan Pemilu partisipatif*, (Penerbit Erlangga, 2015), hal. 19

### **BAB III**

#### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Struktur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung**

Bawaslu yang semula Panwas berubah pada bulan Agustus 2018 yang dimana pembentukan bawaslu kabupaten/kota diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai. Berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu Kota Bandar Lampung mulai bekerja sejak bulan Agustus tahun 2017.

Sedangkan secara teknis, mekanisme rekrutmen Panwaslu Kab/Kota diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

Seperti diterangkan sebelumnya bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, secara administratif dibantu oleh sekretariat Bawaslu Kota. Hal itu dijelaskan dalam pasal Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang menyatakan bahwa Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.<sup>91</sup>


Jajaran Bawaslu Kota Bandar Lampung selain terdiri dari 3 Orang Anggota bawaslu dan Kepala Sekretariat juga terdiri dari 13 orang Pelaksana Non PNS dan 2 orang Pelaksana PNS. Kemudian dalam membantu tugas Anggota Bawaslu, wilayah kerja Pelaksana Non PNS dibagi sesuai dengan kemampuan dan keahliannya mengikuti wilayah kerja Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Dari 13 Pelaksana Non PNS tersebut, 9 orang ditempatkan pada tiga wilayah kerja, 1 orang sebagai staf pengelola keuangan dan 3 orang sebagai staf pendukung. Sementara pelaksana Non PNS ditempatkan sebagai

---

<sup>91</sup>Candrawansah, wawancara ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, 18 Februari 2018

Bendahara Pelaksana Pembantu (BPP) untuk anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN. Adapun susunan struktur Bawaslu Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :



Ketua	: 1 Orang
Anggota	: 2 Orang
Kepala Sekretariat	: 1 Orang
Pelaksana PNS	: 2 Orang
Pelaksana Non PNS	: 13 Orang
Alat Kelengkapan	: Divisi/ Pokja
Panwascam	: 60 Orang

Sementara itu mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan pembagian wilayah kerja dengan rincian sebagai berikut :

Ketua	: Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga
Anggota	: Divisi Organisasi & SDM
Anggota	: Divisi Divisi Penindakan Pelanggaran

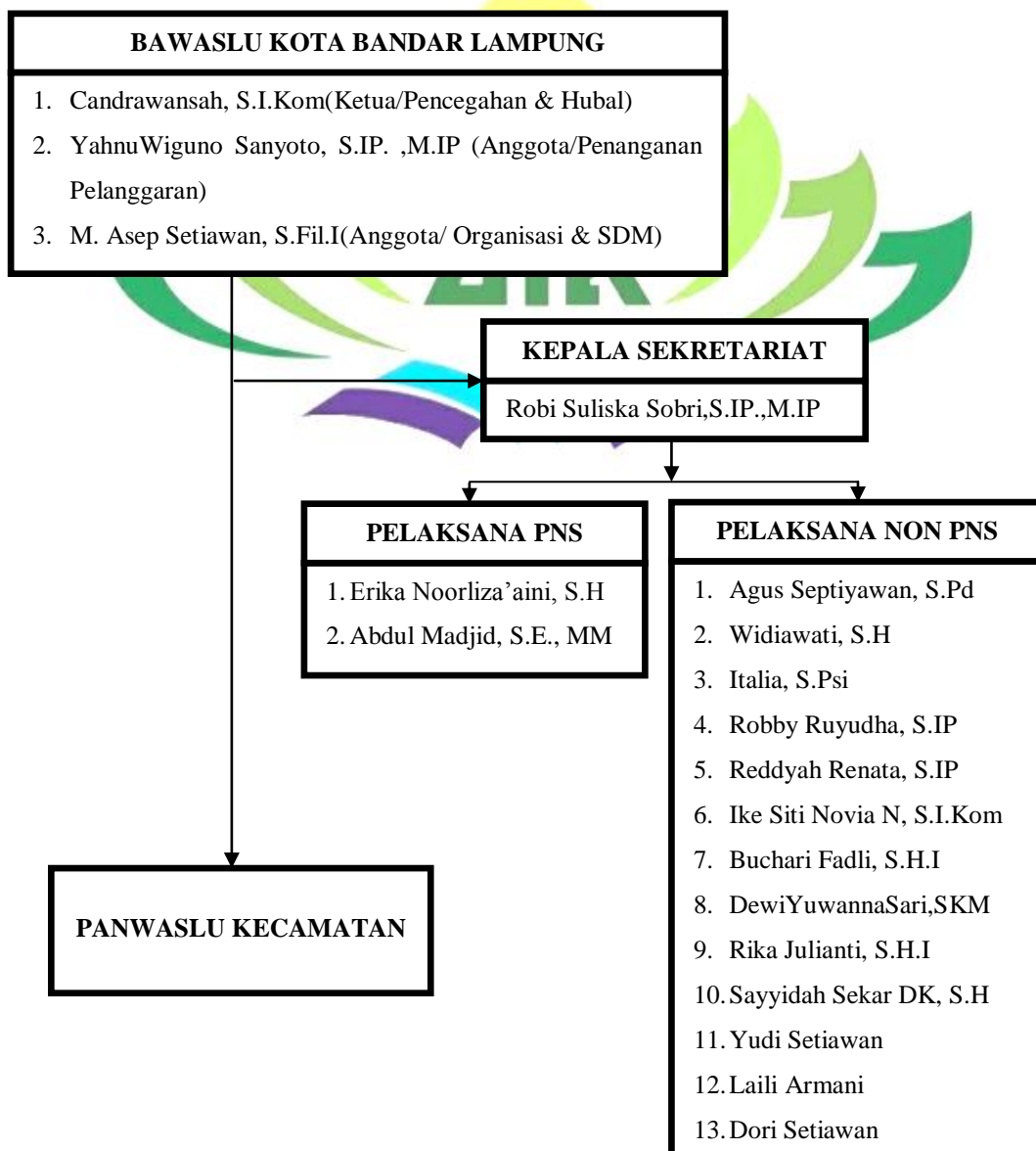
Untuk diketahui bahwa Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung menetapkan pembagian wilayah kerja dan menunjuk Ketua berdasarkan hasil Rapat Pleno anggota Bawaslu tersebut. Sementara itu untuk memberikan dukungan terhadap tugas Anggota Bawaslu, maka Pelaksana Non PNS dibagi pula ke dalam 3 wilayah kerja/Divisi sesuai dengan keahliannya masing-

masing. Berdasarkan uraian tersebut diatas, susunan organisasi Bawaslu Kota dapat dilihat dalam skema berikut:

**Gambar 1 :**

**Bagan Struktur Organisasi**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung**





Tabel 1

## Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung

No	Nama	Divisi/Jabatan	Status
1	Abdul Madjid, S.E.,MM	BPP APBD	Pelaksana PNS
2	Erika Noorliza'aini, S.H	BPP APBN	Pelaksana PNS
3	Agus Septiyawan, S.Pd	Divisi Pencegahan & Hubal	Pelaksana Non PNS
4	Widiawati, S.H	Divisi Pencegahan & Hubal	Pelaksana Non PNS
5	Italia, S.Psi	Divisi Pencegahan & Hubal	Pelaksana Non PNS
6	Robby Ruyudha, S.IP	Divisi Penindakan Pelanggaran	Pelaksana Non PNS
7	Ike Siti N, S.I.Kom	Divisi Penindakan Pelanggaran	Pelaksana Non PNS
8	Reddyah Renata, S.IP	Divisi Penindakan Pelanggaran	Pelaksana Non PNS
9	Buchari Fadli, S.H.I	Divisi Organisasi & SDM	Pelaksana Non PNS
10	Dewi Yuwanna S, SKM	Divisi Organisasi & SDM	Pelaksana Non PNS
11	Rika Julianti, S.H.I	Divisi Organisasi & SDM	Pelaksana Non PNS
12	Sayyidah Sekar DK, S.H	Staf Pengelola Keuangan	Pelaksana Non PNS
13	Yudi Setiawan	Staf Pendukung/ Security	Pelaksana Non

			PNS
14	Laili Armani	Staf Pendukung/ Pramusaji	Pelaksana Non PNS
15	A. Dory Setiawan	Staf Pendukung/ Teknisi	Pelaksana Non PNS

Sementara untuk jajaran pada tingkat Kecamatan, Bawaslu Kota Bandar Lampung membentuk 60 Orang Anggota Panwaslu Kecamatan yang dibagi kedalam 20 wilayah Kecamatan se-Kota Bandar Lampung.

Mekanisme Rekrutmen Panwaslu Kecamatan mengikuti Buku Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan, yang merupakan aturan turunan dari peraturan Bawaslu Nomor Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

Panwaslu Kecamatan diangkat dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor 04/BAWASLU.LA-14/HK.01.01/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Pembentukan Panwaslu Kecamatan yang berpedoman pada dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan mengacu

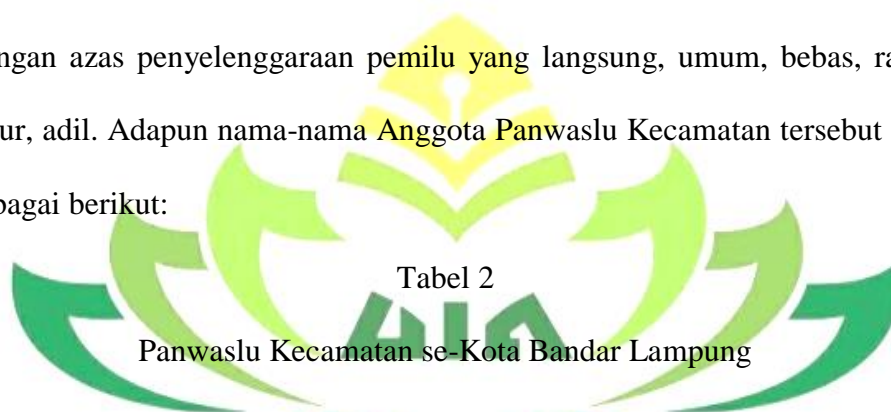
pada Buku Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2017 serta Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. Sesuai dengan aturan diatas maka salah satu tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung adalah menyampaikan pelaporan kegiatan pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan dengan total kelulusan akhir peserta 3 orang di setiap Kecamatan sehingga total jumlah keseluruhan sebanyak 60 orang Panwaslu Kecamatan se-Kota Bandar Lampung .

Tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :

- a. Membentuk Tim Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
- b. Pengumuman Pendaftaran;
- c. Penerimaan Berkas;
- d. Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas Administrasi;
- e. Pengumuman Hasil Pemeriksaan Berkas Administrasi;
- f. Test Tertulis;
- g. Penilaian dan Pengumuman Hasil Test Tertulis;
- h. Persiapan dan Pelaksanaan Test Wawancara;

- i. Penilaian dan Pengumuman Hasil Test Wawancara; dan
- j. Pelantikan Panwaslu Kecamatan se-Kota Bandar Lampung.

Dengan pembentukan kelembagaan Panwaslu Kecamatan tentunya diharapkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung tahun 2018, serta Pemilu tahun 2019 dapat berjalan sesuai dengan azas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Adapun nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:



NAMA	BAGIAN	KECAMATAN
Nenda	Pencegahan & Hubal	Bumi Waras
Aida Asih	Organisasi dan SDM	
Subkhan Faisal, S.H, CIL	Penindakan Pelanggaran	
Rachmat, SE	Penindakan Pelanggaran	Enggal
Ena Suliana	Pencegahan & Hubal	
Amelia Novita	Organisasi dan SDM	
Rosdah	Organisasi dan SDM	Kedamaian
Asiah Nuraini	Penindakan Pelanggaran	
Rozalie Basyrie, S.H.I	Pencegahan & Hubal	
A. Delmi	Organisasi dan SDM	Kedaton
Akhmad Firdaus, S.Th.I	Penindakan Pelanggaran	
Euis Rudiyani	Pencegahan & Hubal	
M. Hirmawan, S.T	Pencegahan & Hubal	Kemiling
Dian Saputra, S.H.I	Penindakan Pelanggaran	

Za'imna	Organisasi dan SDM	
Didi Armadi, S.Pd.I	Organisasi dan SDM	Labuhan Ratu
Rizky Hidayat /Asep Zuhanda	Penindakan Pelanggaran	
Windah Gusdiana P	Pencegahan & Hubal	
Hidayatullah	Pencegahan & Hubal	Langkapura
Yusuf Kriswardi	Organisasi dan SDM	
Burnawan M Rusdi, SH	Penindakan Pelanggaran	
Umi Saroh	Organisasi dan SDM	Panjang
M. Anton Maulana	Penindakan Pelanggaran	
Abd. Yumar Pawe	Pencegahan & Hubal	
Rizkan Tazab	Organisasi dan SDM	Rajabasa
Iin Tajudin, S.I.P	Pencegahan & Hubal	
Ali Husin, S.Sos.I	Penindakan Pelanggaran	
Nico Noviansyah	Penindakan Pelanggaran	Sukabumi
Garda Arian Gunawan	Pencegahan & Hubal	
Kurniawati	Organisasi dan SDM	
Arwan Apriyanto	Organisasi dan SDM	Sukarame
A. Zulfikar M, S.Ag	Pencegahan & Hubal	
Aswan Abdulracman	Penindakan Pelanggaran	
Azhari	Pencegahan & Hubal	Tanjung Karang Barat
Meino Rinaldi	Organisasi dan SDM	
Lera Mutiasari, SE	Penindakan Pelanggaran	
Chandra Iswandi, S.Sos	Organisasi dan SDM	Tanjung Karang Pusat
Aan Meidianto	Penindakan Pelanggaran	
Dhani Kurniadi, A.md	Pencegahan & Hubal	
Meilyadi, S.Sos	Penindakan Pelanggaran	Tanjung Karang Timur
Milana Lastri Mandala, A.Md	Pencegahan & Hubal	
Amir Hakim, S.H.I	Organisasi dan SDM	

Hobi Harta	Pencegahan & Hubal	Tanjung Senang
Kahfi	Penindakan Pelanggaran	
Khizmi	Organisasi dan SDM	
Sugiono, S.T	Pencegahan & Hubal	Teluk Betung Barat
Mohd. Anshori	Organisasi dan SDM	
Ferdian Darwis, S.pd	Penindakan Pelanggaran	
KGS. Thoha Safrizal	Pencegahan & Hubal	Teluk Betung Selatan
Syaifudin, SS	Organisasi dan SDM	
Yulian, SH	Penindakan Pelanggaran	
Peri Irawan, S.Pd	Organisasi dan SDM	Teluk Betung Timur
Miftahul Hadi, S.Sos	Penindakan Pelanggaran	
Ismail Marzuki, SE	Pencegahan & Hubal	
Ahmad Damsir, SE	Organisasi dan SDM	Teluk Betung Utara
Ahmad Juanda, SH.,M.Pd	Penindakan Pelanggaran	
Agus Syarifuddin	Pencegahan & Hubal	
Ekky Julian DS	Pencegahan & Hubal	Way Halim
Andi Ismail Yusuf	Organisasi dan SDM	
Candra Atmiral	Penindakan Pelanggaran	

Namun Pada Perjalanannya, Anggota Panwaslu Kecamatan Labuhan Ratu Atas Nama Rizky Hidayat MA, mengundurkan diri sebab sakit sehingga berhalangan tetap untuk menjalankan tugas sebagai Panwaslu Kecamatan, adapun pengunduran diri tersebut diajukan pada tanggal 30 April 2018 dan disahkan oleh Bawaslu Provinsi Lampung melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 174/K.LA/HK.01.01/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.



Setelah mendapatkan Keputusan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu dari Bawaslu Provinsi Lampung, Bawaslu Kota Bandar Lampung memanggil Sdr. Asep Zuhanda untuk diwawancarai tentang kesiapannya untuk menjadi Pengganti Sdr. Rizky Hidayat MA.

Asep Zuhanda diangkat melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor 26/LA-14/HK.01.01/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Perubahan Surat keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 04/BAWASLU.LA-14/HK.01.01/XI/2017 tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018. Dengan demikian pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 terdapat 1 Pergantian Panwaslu Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung.

Sementara itu, untuk membantu Anggota Panwaslu Kecamatan dalam menjalankan tugasnya, pada tingkat Kecamatan juga dibentuk Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Masing-masing Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang membawahi 6 orang staf, dengan rincian 1 orang Pelaksana PNS dan 5 Orang Pelaksana Non PNS. Sehingga pada tingkat Kecamatan se-Kota Bandar Lampung diketahui ada 20 Orang Kepala Sekretariat dan 120 orang Staf, dengan rincian 20 Orang Pelaksana PNS dan 100 Orang Pelaksana Non PNS.

Ditingkat Kelurahan, Panwaslu Kota Bandar Lampung memiliki 1 orang Anggota Panwaslu Kelurahan yang diangkat melalui Keputusan Ketua

Panwaslu Kecamatan. Sehingga di seluruh kota Bandar Lampung jumlah Anggota Panwaslu Kelurahan adalah sebanyak 126 orang, sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung. Adapun nama-nama Panwaslu Kelurahan tersebut sebagai berikut :

Tabel 3

Panwaslu Kelurahan se-Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama
1	Panjang	Ketapang	Abdulloh
2		Ketapang Kuala	Elis Suryana
3		Way Lunik	Iswanto
4		Pidada	Suhaidi
5		Panjang Utara	Mira Aulia
6		Panjang Selatan	Sutriyono
7		Karang Maritim	Agus Pramono
8		Serengsem	Ferya Nurhadi
9	Kedaton	Sidodadi	Agus Dwi Komarai
10		Surabaya	Iwan Sapta N
11		Penengahan	Hiltoni
12		Penengahan Raya	Era Kumbara
13		Kedaton	Davit Ersoni
14		Sukamenati	Fitri Yani
15		Sukamenati Baru	Rijat Miko
16	Bumi Waras	Kangkung	Ihsan
17		Sukaraja	Muh. Affandi Hs
18		Bumi Waras	Suhaidini
19		Garuntang	Sobari
20		Bumi Raya	Kgs. Zulkarnaen
21	Tanjung Karang Timur	Kota Baru	Ahmad Akmam
22		Tanjung Agung	Wawan Hermawan
23		Sawah Lama	Abdul Muluk
24		Sawah Brebes	Yazid Anhar
25		Kebon Jeruk	Widya Wati
26	Teluk Betung Utara	Sumur Batu	Syahrudin
27		Kupang Raya	Nofrizal
28		Kupang Teba	Achmad Sodik
29		Kupang Kota	Dewi Permata Sari

30		Gulak Galik	Retno Hafitri Agung
31		Pengajaran	Ratu Fitriyah
32	Rajabasa	Rajabasa	Fivi Marice Putri
33		Gd. Meneng Baru	Yulida S
34		Rajabasa Raya	Ali Husin, S.Sos.I
35		Rajabasa Jaya	Andriko
36		Rajabasa Nunyai	Aan Erwandi
37		Rajabasa Pemuka	Akias
38		Gd. Meneng	Achmad Paksi Firdaus
39	Tanjung Karang Pusat	Kaliawi	Robby Cahyadi
40		Kaliawi Persada	Indah Purnama
41		Gotong Royong	Supriyanto
42		Palapa	M. Rifa'i Aly
43		Kelapa Tiga	Zul Hendra
44		Pasir Gintung	Alvin Alyoni
45		Durian Payung	Mesis Yuliana
46		Gunung Sari	Riky Oktariza
47		Enggal	Devina Septi Anggraini
48		Pelita	Tressa Syafitri
49	Enggal	Pahoman	Nurma Septiana
50		Rawa Laut	Rohmanto
51		Tanjung Karang	Septiawan
52	Sukabumi	Sukabumi	Bakti
53		Sukabumi Indah	Febriyati
54		Nusantara Permai	Suwandito
55		Campang Raya	Sahrin
56		Campang Jaya	Enda Suheri
57		Waylaga	Wawan Irawan
58		Waygubak	M Sanusi
59	Teluk Betung Barat	Negeri Olok Gading	Ema Zaitun
60		Sukarame Ii	Ahmad Abu Bakar Siddik
61		Batu Putuk	Risdianto
62		Kuripan	Iwan Ardiansyah
63		Bakung	Yudi Irawan
64	Kedamaian	Tanjung Gading	Evry Mahmudiyah
65		Tanjung Agung Raya	Rama Indra Saputra
66		Kali Balau Kencana	M. Jeni
67		Bumi Kedamaian	Acan
68		Kedamaian	Winda Sari
69		Tanjung Raya	Chairul Ichwan
70		Tanjung Baru	Hendra Syafari
71	Teluk Betung	Keteguhan	Aan Ali Jama'n

72	Timur	Perwata	Anton Zulkarnain
73		Kota Karang Raya	Bambang Zulkarnain
74		Way Tataan	Hendri Gunawan
75		Sukamaju	M. Yunus
76		Kota Karang	Nur'aini
77	Kemiling	Kemiling Permai	Ahmad Fathoni
78		Kedaung	Rodi Ediansyah
79		Sumber Rejo Sejahtera	Eka Apriyani
80		Sumber Rejo	Yanto Wijaya
81		Pinang Jaya	Siti Nawangsih
82		Kemiling Raya	Mastuti
83		Sumber Agung	Jarwati
84		Beringin Raya	Irvan Kesuma
85		Beringin Jaya	Muhaimin
86	Sukarame	Way Dadi Baru	Bram Jemy Manopo
87		Way Dadi	Dedi Iskandar
88		Sukarame	M. Nasir
89		Sukarame Baru	Checep Andeska
90		Korpri Jaya	Herwani
91	Teluk Betung Selatan	Korpri Raya	Suprpto
92		Gunung Mas	Abi Sabri Noor
93		Sumur Putri	Edi Suhaimi
94		Pesawahan	Entus Sofian, S.Kom.
95		Talang	Ria Arief
96		Gedung Pakuon	Salman Alfarizi S.IP.
97		Teluk Betung	Haryanto
98	Tanjung Karang Barat	Sukajawa Baru	Sahrial. J
99		Gedong Air	Marhasan
100		Susunan Baru	Kurniawan
101		Segala Mider	Iffa Yulianti
102		Sukadanaham	Agus
103		Sukajawa	Indra Bangsawan
104		Kelapa Tiga Permai	Fitriuddin.Ar
105	Langkapura	Langkapura	Susilowati, S.I Kom
106		Langkapura Baru	Ahmad Afandi
107		Bilabong Jaya	Shinta Paskah
108		Gunung Agung	Arivudin
109		Gunung Terang	Purnomo, SE
110	Tanjung Senang	Tanjung Senang	Santowi Saputra
111		Pematang Wangi	Hariyanto
112		Labuhan Dalam	Mikrat Duddin
113		Way Kandis	Nirwan Hamid
114		Perum Way Kandis	M. Anggi Barozi

115	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu Raya	Sulhi
116		Labuhan Ratu	Noviana Basri
117		Sepang Jaya	Ferry Apollo
118		Kampung Baru Raya	Agunk Dwi Prawidha
119		Kota Sepang	Siti Mutmainah
120		Kampung Baru	Nofa Antonius
121	Way Halim	Jagabaya I	Wira Bangsawan
122		Jagabaya II	Erviansah, Amd
123		Jagabaya III	Hi. Samsu Rohman, S.E.
124		Perumnas Way Halim	Agustini. As, S.Sos
125		Way Halim Permai	Rensiyana
126		Gunung Sulah	Sahati

Nama-nama tersebut diatas, adalah nama Panwaslu Kelurahan yang bertugas sampai akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018. Sebab ada 8 orang Panwaslu Kelurahan yang mengundurkan diri karena berhalangan tetap untuk menjalankan tugasnya. Nama-nama yang mengundurkan diri tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 4

Daftar Pergantian Panwaslu Kelurahan

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan
1	Joncobi Syaheru	Pelita	Enggal
2	Ahmad Syaifullah	Way Gubak	Sukabumi
3	Suparji	Beringin Jaya	Kemiling
4	Ahmad Rasyid	Sumber Rejo Sejahtera	Kemiling
5	Ruli Sigit Fiantoro	Kemiling Raya	Kemiling
6	Amrah Bangsawan	Kopri Raya	Sukarame
7	Masum	Susunan Baru	Tanjung Karang Barat
8	Wahyudin	Sukadanaham	Tanjung Karang Barat

Pada tahun 2017 menjadi sepadan di tingkat kabupaten kota, di tingkat RI ada 5 pimpinan atau 5 komisioner, ditingkat provinsi tergantung dari jumlah penduduk ada yang jumlahnya ada yang 5 ada ada yang 7 tergantung dari jumlah penduduk. Penduduk yang jumlah masyarakatnya lebih dari 10 jt atau lebih itu ada 7 komisioner kurang dari 10 jt maka ada 5 komisioner ditingkat provinsi, lalu ditingkat kabupaten kota ada 3 dan 5 tergantung jumlah dan penduduk.

Jika jumlah penduduknya lebih dari 500 ribu atau lebih itu jumlah komisionernya ada 5 tetapi jika kurang dari itu maka jumlah komisionernya 3 ditingkat kabupaten yang sesuai dengan amanat dari UU no. 7 tahun 2017, untuk ditingkat panwas kecamatan semuanya ada 3 dan tidak mengenal jumlah. Untuk ditingkat kelurahan hanya ada 1 dan untuk dijumlah TPS, karena kita juga sekarang ada pengawas TPS memang berbeda dengan UU no. 15 Tahun 2011, didalam 1 TPS ada 1 Pengawas TPS di setiap TPS. Dalam UU No. 10 Tahun 2016 memang sudah ada pengawas TPS.

Karena Pengawas pemilu merupakan lembaga publik jadi dalam rekrutmen keanggotaan menggunakan sistem keterbuka yang dimana diumumkan bagi khalyak atau masyarakat yang memang secara administrasi sesuai dengan aturan sesuai dengan ketentuan bahwa misalkan di setiap kecamatan mengumumkan minimal pendaftaranya 12 orang lalu kita lakukan pengseleksian dari dilihat pendaftarannya, kelengkapan administrasinya lalu dilakukannya tes tertulis untuk mengambil 6 orang lalu seleksi untuk menjadikan 3 orang dengan proses wawancara yang dilakukan oleh Bawaslu



Kota Bandar Lampung, untuk ditingkat kelurahan juga diumumkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan dipanwas kecamatann tetapi tidak melalui tes tertulis langsung dilakukan wawancara untuk menyeleksi 1 orang ditingkat kelurahan/desa, dan untuk di tingkat TPS sama seperti itu minimal pendaftar 3 org untuk ditingkat TPS dan langsung dilakukannya wawancara untuk mengetahui memang layak ataupun tidak untuk didalam ataupun menjadi pengawas pemilu. Dalam hal ini panwaslu persyaratannya sangat ketat daripada dari pps atau pkk, syarat minimal umur 25 tahun.

#### **B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung**

Tugas dan wewenang badan pengawas pemilihan umum kota bandar lampung pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 sudah diatur dalam Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2016 yang dimana pasal 30 bahwa Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi :
  1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
  2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
  3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
  4. Proses dan penetapan calon;
  5. Pelaksanaan kampanye;

6. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan;
  8. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
  9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
  10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
  12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan; dan
  13. Proses pelaksanaan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan menegani pemilihan;
  - c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
  - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
  - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
  - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU

Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan

- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal ini selaku badan pengawas mempunyai program kerja untuk pelaksanaan dari tugas pengawas pemilihan umum kepala daerah pada kota Bandar Lampung, sebagai bawaslu Kabupaten/Kota program kerja yang berkaitan dengan partisipasi publik, yang dimana panitia pengawas membuat acara yang dikemas dalam diskusi panel yang melibatkan semua stakeholder untuk menggugah masyarakat agar ikut serta dan berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah.

Bawaslu menghimbau dan membuka kepada masyarakat jika terdapat pelanggaran dan terjadi pelanggaran laporan segera kepada badan pengawas pemilu selaku pengawas pemilihan kepala daerah tahun 2018. Dan hal ini yang selalu dihimbaukan kepada masyarakat dan selalu disosialisasikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengawasan pemilihan umum kepala daerah tahun 2018. Ini lah salah satu pelaksanaan tugas dari panitia pengawas kota Bandar Lampung.

Selain itu Pembentukan Sentra Gakkumdu penting mengingat penanganan kasus seputar Pemilukada berkejaran dengan waktu yang sangat terbatas. Dengan adanya Sentra Gakumdu diharapkan dapat tercapai penegakan hukum tindak pidana Pemilu sesuai dengan prinsip peradilan yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak.

Dalam hal laporan/temuan diterima, Pengawas Pemilu membuat dan mengisi format laporan/temuan serta memberikan nomor terhadap pelapor diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan. Setelah laporan/temuan diterima, pengawas Pemilu didampingi oleh Sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir. Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan Penyelidikan setelah Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyelidikan. Penyelidik Tindak Pidana Pemilihan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas tersebut.

Pada pengawas Pemilu, Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal laporan/temuan diterima oleh Pengawas Pemilu melakukan pembahasan pertama. Pembahasan pertama dilakukan untuk menemukan peristiwa pidana pada Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti – bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilu dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pemilihan yaitu pelanggaran

tindak pidana pemilu, pelanggaran Administrasi pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.

- 1) Pelanggaran Kode Etik merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggaraan yang berpedoman kepada sumpah/janji yang diucapkan sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan asas penyelenggaraan pemilu yang terkait dalam pelanggaran kode etik pemilu adalah penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah baik staf sekretariat dari KPU beserta seluruh jajarannya, maupun Bawaslu beserta jajarannya. Akibat dari pada pelanggaran atas kode etik penyelenggaraan pemilu DKPP dapat menjatuhkan sanksi dan rehabilitasi. Yang dimaksud sanksi dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.
- 2) Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lainnya yang diatur dalam Peraturan KPU.
- 3) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran Pemilihan dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu.

Tidak hanya itu, pelaksanaan tugas bawaslu Kabupaten/Kota juga melakukan pengawasan dalam setiap prosedur baik dalam prosedur sosialisasi penyelenggaraan pemilihan, prosedur penyelenggaraan pemilihan, sampai prosedur penyelesaian dugaan-dugaan pelanggaran. Dalam hal ini panitia pengawas melakukan proses yang semuanya bisa dilihat bahwa peserta pemilihan umum kepala daerah dari 4 calon pasangan mendapatkan pelayanan



secara maksimal dengan tidak mendiskriminasi salah satu pasangan calon, semuanya yang melanggar akan dipanggil dan dilakukan klarifikasi pada bawaslu kota Bandar Lampung. Hal ini salah satu bagian badan pengawas untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas pemilihan umum.

Semua pelaksana kampanye dari ke empat tim peserta pemilihan umum kepala daerah tidak memandang kedekatan atau seperti apapun, tetapi jika ada yang melanggar di luar prosedur kampanye pasti akan ditangani oleh badan pengawas pemilihan dari beberapa informasi yang didapatkan oleh khalayak dan masyarakat bahwa kita bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi dari pengawas pemilihan umum kota Bandar Lampung.<sup>92</sup>

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Point diatas, badan pengawas pemilihan umum Kota dapat:

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Point diatas huruf;
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

---

<sup>92</sup>Candrawansah, wawancara ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, 18 Februari 2018

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Tugas Dan Wewenang Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Bandar Lampung.**

Sejak Agustus Tahun 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya di singkat Panwaslu Kabupaten/Kota berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2016 Bawaslu kota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi :
  1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
  2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
  3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
  4. Proses dan penetapan calon
  5. Pelaksanaan kampanye;
  6. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan;
  8. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
  9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;

10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
  12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan; dan
  13. Proses pelaksanaan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan menegani pemilihan;
  - c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
  - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
  - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
  - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
  - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretaris KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;

- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam regulasi Undang-Undang No.10 tahun 2016 yaitu tugas dan wewenang dari pengawas pemilihan, dapat dilihat peran bawaslu dari segi pengawasan yang dimana untuk pencegahan dalam hal-hal yang tidak bersifat demokratis dalam keberlangsungan pemilihan umum kepala daerah di kota Bandar Lampung pada tahun 2018.

Pengawasan sangat diperlukan untuk mengontrol dan mencegah timbulnya hal yang tidak boleh dilakukan, seperti *money politic*, memanipulasi data suara, memberikan kesaksian palsu dalam penghitungan suara, dan masih banyak lagi tindakan-tindakan yang dilarang dalam pemilihan. Hal tersebut adalah aturan yang tidak diperbolehkan dalam pemilihan umum kepala daerah karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan dalam pemilihan kepala daerah juga sangat tidak mencerminkan negara yang demokratis. Tugas dan wewenang dari badan pengawas pemilihan sangat penting untuk mengawasi dan mencegah timbulnya pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi di pemilihan kepala daerah kota Bandar Lampung.

Dari hasil wawancara yang juga di sampaikan bahwa tujuan bawaslu kota Bandar Lampung memelihara hak pilih masyarakat di kota Bandar Lampung

untuk memilih calon kepala daerah yang sesuai hati nurani bukan berdasarkan uang, kedudukan, golongan, dan bawaslu memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan informasi jika terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan, hanya saja wewenang bawaslu tidak dapat memberikan sanksi langsung kepada pelanggar-pelanggar pemilihan.

Dalam penanganan pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran Administrasi pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dalam hal ini seperti yang sudah dicantumkan dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yaitu jika bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan, maka bawaslu akan menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Dalam penindakan sebuah dugaan pelanggaran itu dilakukan oleh 3 instansi yang berwenang yaitu bawaslu, kepolisian dan kejaksaan yang disebut sentra penegak hukum terpadu atau bisa disebut dengan Gakkumdu,

Pelaksanaan tugas bawalu kota dalam penanganan pelanggaran yang terdapat pelanggaran kode etik yang berunsur ASN (Aparatur Sipil Negara), yang dimana merupakan bagian tugas dari panitia pengawas dalam menyelesaikannya, sehingga pelanggaran yang telah ditemukan ini akan diteruskan kepada instansi yang berwenang, misalkan adanya ASN yang ikut menyebarkan sebuah bahan kampanye selain ada unsur pidana pemilihan umum maka pelanggaran administrasi dan bentuk lainnya akan

direkomendasikan berdasarkan kepada stakeholder pada insfektorat dan bisa juga kepada kementrian aparatur sipil negara dan komisi aparatur sipil negara ARB aparatur sipil negara. Tiga instansi tersbut akan diberikan sebagai surat rekomendasi bahwa jika adanya pelanggaran kode etik, hal ini biasanya dilakukan bahwa adanya aparatur sipil negara yang melanggar peraturan di lingkup yang diawasi oleh panitia pengawas pemilihan.

Dapat disimpulkan dalam uraian diatas, bahwa bawaslu kota Bandar Lampung dalam hal ini telah melakukan tugas dan wewenangnya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bawaslu sebagai pengawas pemilihan telah melakukan pengawasan dari pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan, lalu menyampaikan temuan-temuan dugaan pelanggaran, hingga proses penindak lanjuti setiap dugaan pelanggaran.

**B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Tugas Dan Wewenang Bawaslu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Di Kota Bandar Lampung.**

Tugas dan wewenang dari pengawas pemilihan, berdasarkan hasil wawancara dari ketua badan pengawas pemilihan kota Bandar Lampung dimana pertama kali dilakukan adalah dari segi pencegahan dan pengawasan yang sudah di tertera dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.



Bawaslu selaku pengawas mengirimkan surat yang menyatakan informasi kepada peserta pemilihan berkaitan dengan aturan apa yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan agar tidak terjadinya pelanggaran, sejalan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

Maksud dari kemungkaran yang dilakukan pada saat pemilihan umum kepala daerah seperti, memanipulasi data pemilihan yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilihan atau melakukan kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan dengan cara mendiskriminasi dan memberikan uang kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon yang ingin dimenangkan. Jual beli suara (*money politic*) dalam pemilihan termasuk kategori *risywah* yang serupa dengan tindakan korupsi.

Pada masa Rasulullah orang-orang mukmin diperintahkan agar mendamaikan dua golongan mukmin yang berkonflik atau berperang dengan adil dan memulihkan hak-hak masing-masing secara seimbang. Orang mukmin juga diperintahkan berbuat baik dan memberi apa yang menjadi hak dan bagian terhadap golongan non-muslim yang tidak memerangi dan mengusir mereka karena alasan agama, karena Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Prinsip keadilan dan persamaan, tidak boleh adanya diskriminasi pada pasangan calon kepala daerah yang dimana semua dilihat sama dan tidak ada siapa yang paling istimewa. Jika salah satu pasangan calon melakukan suatu pelanggaran maka harus diselesaikan dengan aturan yang sudah ada. Dengan demikian prinsip penetapan hukum pun diterapkan untuk para pelanggar

pemilihan umum kepala daerah yang dimana pada masa Rasulullah menjadi khalifah mempunyai dasar hukum untuk menindak peserta perjanjian yang melakukan makar yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat.

Dalam pemilihan kepala daerah prinsip kebebasan sangat ditekankan pelaksanaannya karena kebebasan juga merupakan salah satu asas dalam pemilihan kepala daerah, tugas bawaslu dalam pengawasan yang tidak hanya untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan-kecurangan dalam pemilihan umum kepala daerah tetapi juga untuk menciptakan prinsip kebebasan. Kebebasan dalam memilih yang berasal dari hati nurani bukan karena paksaan.

Dalam Kaidah الضَّرَرُ يُزَالُ mempunyai arti bahwa seluruh yang menimbulkan bahaya harus dienyapkan. Kaidah ini menekankan untuk menghilangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar tidak adanya bahaya yang terjadi dalam pemilihan. Kaidah ini adalah hadis yang di riwayatkan oleh Al-Hakim dari Abi Sa'id al-Hudri :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

“Dari Abi Sa'id Sa'd bin Mâlik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Tidak boleh berbuat bahaya dan membalas perbuatan bahaya kepada orang lain, bagi siapa yang berbuat bahaya kepada orang lain maka Allah akan berbuat bahaya kepada orang tersebut, dan bagi siapa yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkan orang tersebut.”<sup>93</sup> (HR. Al-Hakim)

---

<sup>93</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Anglo Media, 2004), H. 127

Badan pengawas Pemilihan juga melakukan tugas dan wewenangnya pengawasan dalam setiap prosedur baik dalam prosedur sosialisasi penyelenggaraan pemilihan, prosedur penyelenggaraan pemilihan, sampai prosedur penyelesaian dugaan-dugaan pelanggaran. Tugas untuk menyelesaikan sebuah dugaan penyelenggaraan dengan melaksanakan konsep penanganan pelanggaran yang dimana ini juga merupakan tugas pokok dari panitia pengawas karena didalam penanganan pelanggaran terdapat beberapa macam pelanggaran, yang pertama itu pelanggaran dalam administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.

Dalam Kaidah ini تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ (Tindakan Pemerintah Terhadap Rakyat Tergantung Kepada Kemaslahatan) tindakan yang dilakukan oleh bawaslu kota Bandar Lampung selaku pengawas dalam pemilihan kepala daerah tidak diperbolehkan ikut serta dalam kecurangan di dalam pemilihan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri. Sesuai dengan aturan adanya pelanggaran kode etik, yang dimana kode etik ini biasanya dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yang ada di jajaran pengawas atau pun jajaran KPU, jajaran PPK, dan jajaran PPS, yang dimana melanggar kode etik akan di proses atau bawaslu menerima dugaan tersebut maka akan diteruskan ke BKPP. Dan jika pelanggaran itu benar terjadi sangat diharuskan pemberian sanksi yang tegas sesuai ketentuan dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran, bawaslu juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sebuah sengketa

proses, sengketa tersebut akan diputuskan apakah sengketa tersebut menjadi pelanggaran atau bukan pelanggaran.

Tugas badan pengawas pemilihan umum yang sebagai pengawas pemilihan umum ini bukan hanya dalam segi untuk mencegah dari kemungkaran tetapi juga untuk menghilangkan ke mudaratan sekaligus pengerat persaudaraan dan memperkuat persatuan, yang dapat kita ketahui bahwa pemilihan umum kepala daerah banyak memberikan akibat perpecahan didalam tatanan masyarakat yang dikarenakan perbedaan pendapat dan pilihan. Tugas dan wewenang bawaslu sangat penting untuk mempersatu masyarakat yang berbeda pendapat dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu menjadi pemilih yang demokratis agar timbulnya perdamaian dan persatuan dalam pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah pemerintahan dalam *fiqh siyasah*.

Badan pengawas pemilihan umum jika di hubungan dengan *fiqh siyasah* harus lah sejalan dengan *Wilayah al-hisbah* dan *Wilayah al-mazalim*. *Wilayah al-hisbah* yang merupakan salah satu lembaga peradilan Islam yang khusus menangani kasus moral dan berbagai bentuk maksiat. Wewenang *al-hisbah* lebih menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran. Dalam hal ini *Wilayah al-hisbah* pada masa Rasulullah SAW juga pernah di adakan untuk pengawasan pasar, agar tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam transaksi jual beli.

Selain itu lembaga yang terkait untuk menangani pelanggaran amar makruf nahi munkar, bawaslu merupakan lembaga yang mempunyai tujuan yang sama dengan *wilayah al-mazhalim*, didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat. Yang dimana tujuan bawaslu kota Bandar Lampung memelihara hak pilih masyarakat di kota Bandar Lampung untuk memilih calon kepala daerah yang sesuai hati nurani bukan berdasarkan uang, kedudukan, golongan, dan bawaslu memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan informasi jika terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan, hanya saja wewenang bawaslu tidak dapat memberikan sanksi langsung kepada pelanggar-pelanggar pemilihan, berbeda hal dengan *Wilayah al-hisbah* dan *Wilayah al-mazalim* bawaslu hanya sebatas untuk memberikan surat rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu agar dapat ditindak lanjuti dan untuk pemberian sanksi diberikan wewenangnya kepada lembaga yang berwenang untuk pelanggar-pelanggar dalam pelaksanaan pilukada.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Badan pengawas pemilihan umum mempunyai tugas dan wewenang yang sangat penting untuk merealisasikan asas-asas pemilihan umum kepala daerah, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adapun tugas dan wewenang dari pengawas pemilihan umum diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yaitu melaksanakan pengawasan dari sosialisasi penyelenggaraan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, sampai proses penindak lanjuti setiap dugaan pelanggaran.
2. Tugas dan wewenang *bawaslu* yang dilaksanakan sejalan dengan yang di atur dalam pasal 30 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan dalam tinjauan *fiqh siyasah Wilayah al-hisbah* dan *Wilayah al-mazalim* bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan wewenang badan pengawas pemilihan umum dapat yang merupakan pengamalan dari *amar ma'ruf nahi munkar*, menyuruh kepada makruf dan mencegah kemunkaran. Serta sejalan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah kepemimpinan dalam *fiqh siyasah* yaitu yang berbahaya harus dihilangkan, Kebijaksanaan Pemerintah Terhadap Rakyat Tergantung Kepada Kemaslahatan, dan Tidak Boleh Membuat Bahaya dan Membalas perbuatan bahaya kepada orang lain.

## B. Saran

Badan pengawas pemilihan umum mempunyai tugas yang sangat penting dalam menegakkan pemilihan yang demokratis dan berintegritas, tugas dari badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota sudah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Maka dari itu penulis dalam hal ini memberikan saran untuk meningkatkan kembali kinerja panitia pengawas pemilihan umum dalam mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum kepala daerah selain itu penanganan pelanggaran harus diselesaikan dengan maksimal karena masih maraknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Provinsi Lampung.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

A.Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* , Bandung : PT.Cipta Aditya Bakti, 2004.

Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014.

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: Rajawali, 1993.

Ahafidh, Masrap Suhaemi BA, *Tarjamah Riadhus Shalihin*, Surabaya: Mahkota, 1986.

Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Anglo Media, 2004.

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafik, 2012.

Alwi, Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Djazuli, MA., *Fiqh Siyash Iplementasi Kenaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta : Kencana, 2003.

*Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1982.

Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.

GunawanSusanto, *Pengawasan Pemilu partisipasif*, PenerbitErlangga, 2015.

GunawanSuswanto, *Mengawal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, Penerbit Erlangga, 2016.

H. Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017.

H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta :Sinar Grafik, 2008.

H.Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

H.Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186>, M. Hasbi

Umar, *Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Siyasi*, AL- 'Adalah Vol. 12 No. 2, 2014, h. 262M. Hasbi Umar, *Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Siyasi*, AL- 'Adalah Vol. 12 No. 2, 2014.

<https://marhamahsaleh.wordpress.com/fiqh-siyasah/>, diakses pada 5 Desember 2018 pukul 17:06 wib

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180727132256-32-317449/pemenang-pilkada-lampung-diduga-lakukan-politik-uang>, diakses pada tanggal 8 November 2018 pukul 14:02

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

MB Rahimsyah Setyo Adhie, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Aprindo, 2015.

Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Inonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktri Politik Islam*, Jakarta:

Prenamedia Group, 2014.

Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik*

*Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009.

Nurhayati, Ali Imran Siaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenamedia

Group, 2018.

Petter Salim, Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*,

Jakarta: Modern Englis Press, 1991.

R. Erman Muchjidin, *Tata Negara*, Jakarta: Yudhistira, 1987.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2014.

S. Wokowasito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang*

*Disempurnakan Menurut Pedoman Lembaga Bahasa Nasional (Edisi*

*Revisi)*, Malang : C.V. Pengarang, 1999.

Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*,

Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.

Sondangn P Siagian, *Filsafat Adminstrasi*, Jakarta: CV Gunung Agung, 1985.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta:

Reneka Cipta, 2013.

Suparto, *Tata Negara 2*, Bandung : Empat Saudara, 1984.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Gubernur, Kedudukan Peran Dan Kewenangannya*,

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan

Lampung, 2014.

Tim Pengajar HTN FH UNILA, *Hukum Tata negara*, Bandar Lampung: Justice

Publisher, 2014.

U. J. Kaioh, *Demokrasi dan Kearifan Lokal Pada Pilkada Langsung*, Jakarta:

Kata Hasan Pustaka, 2008.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*,

Penerjemah: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.

## PANDUAN WAWANCARA

Responden : Ketua Badan Pengawasan Pemilu Kota Bandar Lampung

### Identitas Responden

Nama : CANDRAWANSAH, S.I.KOM

Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung

### Daftar Pertanyaan

1. Mohon bapak jelaskan bagaimana Gambaran Struktur dari Bawaslu Kota Bandar Lampung ?
2. Mohon bapak jelaskan bagaimana, tugas dan wewenang Dari Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Pemilukada pada tahun 2018 ?
3. Mohon bapak jelaskan apakah terdapat Program Kerja untuk melaksanakan tugas Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Pemilukada pada tahun 2018 ?

